

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan perkenaan-Nyalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif baik dari aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat umum maupun masyarakat dunia usaha. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan LKjIP sebagai perwujudan pelaksanaan sistem LKjIP.

Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong serta sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan sisi lain, merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Akhirnya, semoga LKjIP tahun 2025 ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang nyata tentang evaluasi pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2025.

Parigi, 31 Maret 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG



ERWIN BURASE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Parigi Moutong.....	2
1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Visi dan Misi Kabupaten Parigi Moutong.....	22
2.2 Tujuan dan Sasaran	24
2.3 Perjanjian Kinerja	25
2.4 Cascading Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	33
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	35
3.3 Capaian Indikator Program dan Kegiatan Pemerintah.....	86
3.4 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	86
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2 Tindak Lanjut	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong	2
Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong.....	3
Tabel 1.3 Jarak Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong	5
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Parigi Moutong Menurut Kecamatan Beserta Laju Pertumbuhan Penduduk	7
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	13
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	14
Tabel 1.7 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	15
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.....	24
Tabel 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	34
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	36
Tabel 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Pertama.....	37
Tabel 3.4 Capaian Reformasi Birokrasi General	39
Tabel 3.5 Capaian Komponen Penilaian AKIP.....	41
Tabel 3.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Kedua.....	48
Tabel 3.7 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	50
Tabel 3.8 Rasio Guru dan Murid.....	52
Tabel 3.9 Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Ketiga	65
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Sektor Perikanan	67
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sektor Pertanian.....	68
Tabel 3.12 Realisasi Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten Parigi Moutong.....	72
Tabel 3.13 Sasarana dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Keempat.....	73
Tabel 3.14 Hasil Penertiban Persetujuan Lingkungan Hidup 2025	77

Tabel 3.15 Hasil Pembinaan/Pengawasan Ketaatan Badan Usaha/Kegiatan.....	78
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong	3
Gambar 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong	5
Gambar 2.1 Visi Kabupaten Parigi Moutong	27
Gambar 2.2 Misi Kabupaten Parigi Moutong.....	28
Gambar 2.3 Cascading Misi I.....	29
Gambar 2.4 Cascading Misi II.....	30
Gambar 2.5 Cascading Misi III.....	31
Gambar 2.6 Cascading Misi IV.....	32
Gambar 3.1 Trend Capaian Kinerja UHH Tahun 2024-2025.....	55
Gambar 3.2 Trend Prevalensi Stunting Tahun 2023-2025	56
Gambar 3.3 Sebaran Prevalensi Stunting Perpuskesmas Tahun 2025	57
Gambar 3.4 Penerimaan Penghargaan CKG Terbaik 2025	58
Gambar 3.5 Penerimaan Penghargaan Ketersediaan Obat dan Vaksin Terbaik 2025	59
Gambar 3.6 Pelatihan di Bidang Kesehatan Tahun 2025.....	60
Gambar 3.7 Pembangunan Puskesmas Torue dan Labkesmas	61
Gambar 3.8 Bangunan Labkesmas	61
Gambar 3.9 PKS Universitas Tadulako	62
Gambar 3.10 PKS Universitas Gajah Mada	63

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja suatu instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban ini merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong menyajikan capaian isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Untuk itu, seluruh program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penetapan Kinerja (TAPKIN), dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Parigi Moutong secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 berdasarkan RPD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2026 seperti penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Sedangkan penilaian kinerja pada LKjIP akan ditekankan pada pencapaian sasaran. Capaian kinerja sasaran Kabupaten Parigi Moutong merupakan kontribusi pencapaian sasaran masing-masing satuan kerja. Sasaran tersebut kemudian akan dikelompokkan dalam tujuan yang sesuai. Hal ini berarti, LKjIP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 merupakan suatu kombinasi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Kabupaten Parigi Moutong.

Capaian kinerja indikator sasaran instansi dilakukan dengan mengambil capaian indikator kinerja *outcome* dari program/kegiatan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah untuk mencapai sasaran atau dengan kata lain untuk mencapai suatu sasaran tertentu, maka harus dilakukan dengan satu atau beberapa kegiatan.

Nilai Capaian sasaran diukur berdasarkan Misi 1, Misi 2, Misi 3, Misi 4 dan ditetapkan 16 Indikator Sasaran yang dapat diukur. Selain nilai capaian target indikator untuk menuju sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong juga berusaha mengungkapkan capaian kinerja makro berupa pertumbuhan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dan pendapatan perkapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Pengungkapan indikator makro dimaksudkan untuk mengetahui besaran makro yang merupakan dampak dari seluruh aktivitas pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, perbaikan yang terus menerus akan kami lanjutkan seperti pengembangan sistem pengukuran kinerja, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban.

Juga sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan

dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Parigi Moutong merupakan Daerah Otonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan sudah melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama kurun waktu 13 Tahun, Kabupaten Parigi Moutong dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah yang diresmikan di Jakarta tanggal 10 April 2004. Luas wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah 6.231,85 Km² yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) Kecamatan, 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Desa) dan 5 (Lima) Kelurahan. Secara Geografis Kabupaten Parigi Moutong terletak pada 0.75 ° LU - 1°LS dan 120°- 121,5 °BT dan dilalui oleh garis Khatulistiwa yang membentang dari Desa Maleali Kecamatan Sausu sampai dengan Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong sepanjang ± 472 Km, dengan batas wilayah sebagai berikut :

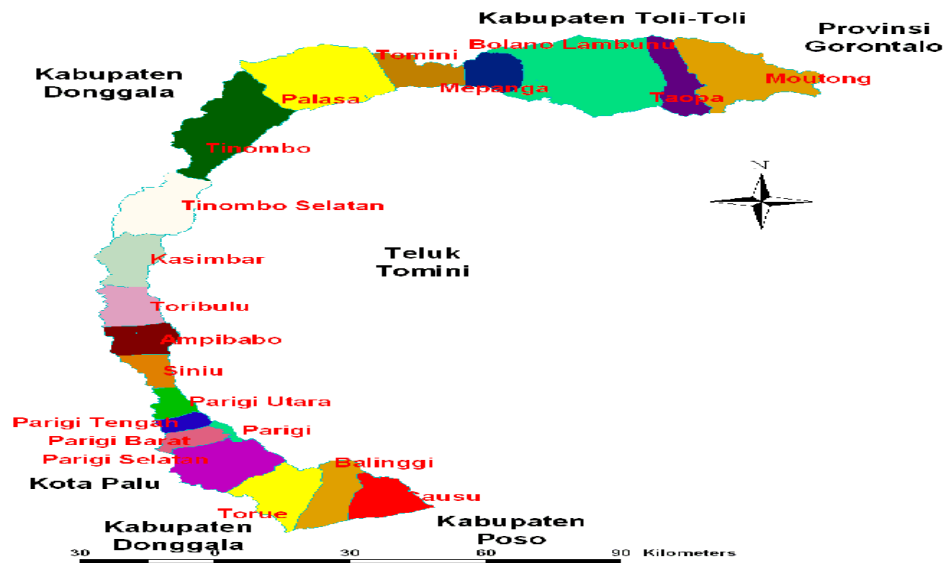
Tabel 1.1
Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong

ARAH	PERBATASAN
Utara	Berbatasan Dengan Kabupaten buol, Kabupaten Tolitoli, dan Provinsi Gorontalo
Selatan	Berbatasan Dengan Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi
Barat	Bertasan Dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu

Timur	Berbatasan dengan Teluk Tomini
-------	--------------------------------

Sumber Data : Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Batas wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



Gambar 1.1
Peta Batas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong

Sumber Data : Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Secara administratif, Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan, 278 Desa, 5 (Lima) Kelurahan, 1.280 RW, dan 1.468 RT. Kedua puluh tiga kecamatan tersebut terdiri atas Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Barat, Parigi Utara, Siniu, Ampibabo, Toribulu, Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo, Sidoan, Tomini, Palasa, Mepanga, Ongka Malino, Bolano, Bolano Lambunu, Taopa, Moutong dan Parigi sebagai ibukota kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Parigi Moutong menurut masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong

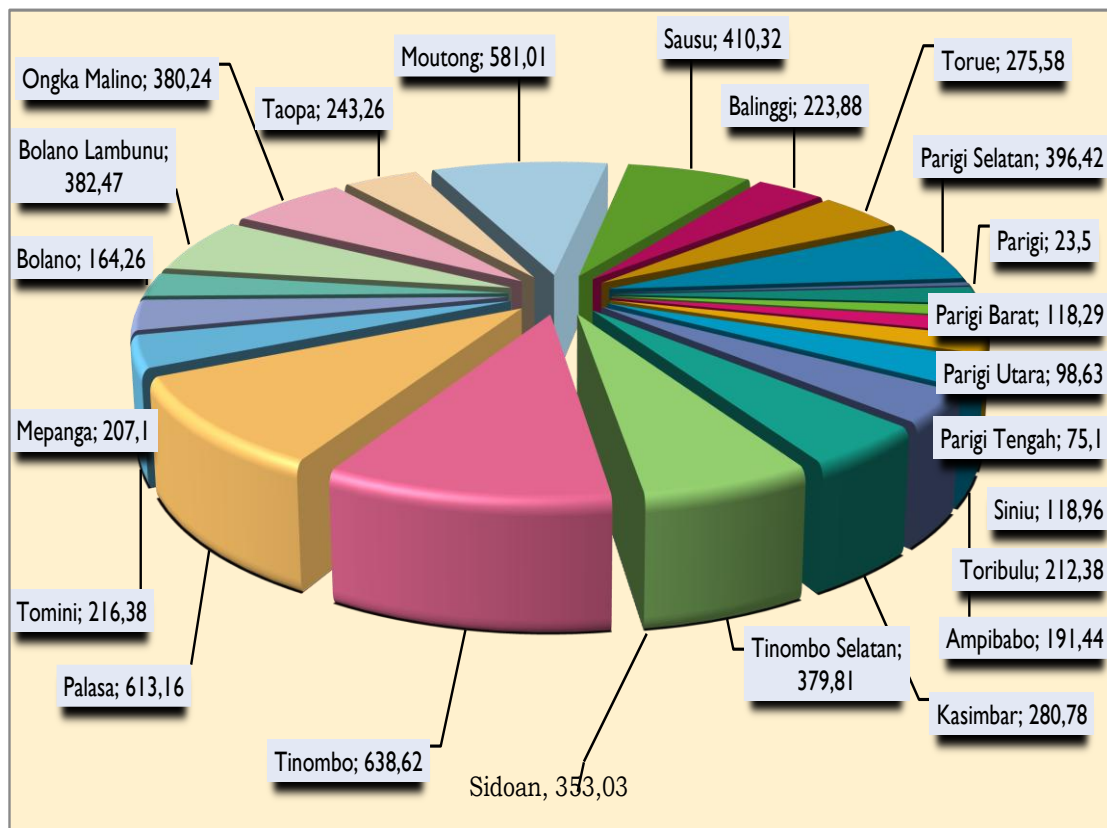
No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Sausu	410,32	6,58
2	Torue	275,84	4,43
3	Balinggi	223,88	3,59

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
4	Parigi	23,50	0,38
5	Parigi Selatan	396,42	6,36
6	Parigi Barat	118,29	1,90
7	Parigi Utara	98,63	1,58
8	Parigi Tengah	75,10	1,21
9	Ampibabo	191,44	3,07
10	Kasimbar	280,78	4,51
11	Toribulu	212,38	3,41
12	Siniu	118,96	1,91
13	Tinombo	285,59	4,58
14	Tinombo Selatan	379,81	6,09
15	Sidoan	353,03	5,67
16	Tomini	216,38	3,47
17	Mepanga	207,10	3,32
18	Palasa	613,16	9,84
19	Moutong	581,01	9,32
20	Bolano Lambunu	382,47	6,14
21	Taopa	243,26	3,90
22	Bolano	164,26	2,64
23	Ongka Malino	380,24	6,10
Parimo Moutong		6.231,85	100.00

Sumber Data : Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Jarak terjauh (290 Km) antara ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Moutong, dan yang terdekat adalah Kecamatan Parigi Barat dengan jarak tempuh 4 Km dari ibukota Kabupaten. Secara geografis, Kabupaten Parigi Moutong cukup strategis karena terletak di daerah lintas Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Luas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong tercatat seluas 6231,85 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 148,690.54 Ha, hutan cagar alam dengan luas sebesar 56.431,57 Ha, hutan produksi terbatas seluas 23.555,99 hutan produksi tetap seluas 110.008,09 Ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.306,47 Ha, dan areal penggunaan lain-lain seluas 250,544 Ha.

Kabupaten Parigi Moutong mempunyai luas wilayah seluas 6.231,85 Km². Batas wilayah administrasi Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:



Gambar 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong

Sumber Data : Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Jarak ibu kota Kabupaten Parigi Moutong dengan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3
Jarak Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong

No	Kecamatan	IbuKota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Kecamatan	Dapat ditempuh melalui
1	Sausu	Sausu	52	Darat
2	Torue	Torue	29	Darat
3	Balinggi	Malakosa	33	Darat
4	Parigi	Masigi	0	Darat
5	Parigi Selatan	Dolago	8	Darat
6	Parigi Barat	Parigimpuu	4	Darat

7	Parigi Utara	Toboli	16	Darat
8	Parigi Tengah	Binangga	9	Darat
9	Ampibabo	Ampibabo	44	Darat
10	Kasimbar	Kasimbar	86	Darat
11	Toribulu	Toribulu	75	Darat
12	Siniu	Siniu	37	Darat
13	Tinombo	Tinombo	167	Darat
14	Tinombo Selatan	Manilili	113	Darat
15	Sidoan	Sidoan	149	Darat
16	Tomini	Tomini	200	Darat
17	Mepanga	Mepanga	214	Darat
18	Palasa	Palasa	185	Darat
19	Moutong	Moutong	290	Darat
20	Bolano Lambunu	Lambunu	260	Darat
21	Taopa	Taopa	278	Darat
22	Bolano	Bolano	255	Darat
23	Ongka Malino	Ongka	240	Darat

Sumber Data : Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya relatif dekat dengan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Parigi Moutong dipengaruhi oleh musim/iklim yaitu musim hujan yang terdiri antara bulan Oktober – Maret dan musim kemarau/panas terjadi pada bulan April – September dan suhu udara maksimum terendah terjadi pada bulan November pada kisaran (31,6°C). sementara suhu udara minimum tertinggi terjadi pada bulan Oktober pada kisaran 23,8° dan suhu udara minimum terendah terjadi pada bulan juni yang mencapai 22,1°, curah hujan rata-rata 98 mm/Thn.

2. Kondisi Demografis

Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya, Jumlah penduduk suatu Daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negative bila dilihat dari dimensi waktu dan Daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumberdaya manusia

rendah, merupakan suatu masaaalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda Ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masaaalah-masaaalah sosial dan ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan persebaran penduduk di Kabupaten Parigi Moutong tidak merata diseluruh kecamatan, dimana kecamatan Parigi sebagai pusat pemerintahan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat yakni sebesar 31.287 jiwa sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada kecamatan Parigi utara yakni 7.270 jiwa, Adapun jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan data Badan Pusat Statistik berjumlah 461.576 jiwa, adapun jumlah penduduk beserta laju pertumbuhan yang tersebar disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten parigi Moutong sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Parigi Moutong Menurut
Kecamatan Beserta Laju Pertumbuhan Penduduk

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	Sausu	20.997	0,10
2.	Torue	20.244	0,03
3.	Balinggi	17.688	-0,07
4.	Parigi	31.287	-0,16
5.	Parigi Selatan	23.257	0,04
6.	Parigi Barat	9.068	0,53
7.	Parigi Utara	7.270	0,13
8.	Parigi Tengah	9.380	0,22
9.	Ampibabo	23.154	0,17
10.	Kasimbar	25.109	0,79
11.	Toribulu	17.676	0,30
12.	Siniu	10.412	0,01
13.	Tinombo	24.465	0,62
14.	Tinombo Selatan	29.541	0,52
15.	Sidoan	15.823	0,18
16.	Tomini	20.450	0,22

17.	Mepanga	30.332	-0,03
18.	Palasa	29.645	0,52
19.	Moutong	22.519	0,15
20.	Bolano Lambunu	20.697	0,38
21.	Taopa	14.704	-0,50
22.	Bolano	16.641	0,52
23.	Ongka Malino	21.217	0,10
Jumlah		461.576	0,22

Sumber Data : Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

3. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2016 sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Bagian Hukum
 - 4. Bagian Kerja Sama
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Bagian Perekonomian
 - 2. Bagian Pembangunan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4. Bagian Sumber Daya Alam
 - c. Asisten Administrasi Umum
 - 1. Bagian Organisasi

2. Bagian Umum
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sekretariat DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
 - Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
 - 4) Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Parigi moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 6) Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan perizinan;
- 17) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;

- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - 19) Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 21) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
 - 22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Badan Daerah terdiri dari;
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan daerah serta penelitian pada bidang kelitbang;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang Keuangan;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Parigi Moutong dengan tipe A, Melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan Pajak Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, tipe B. Melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong tipe A, melaksanakan Sebagian fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Kecamatan, yang terdiri dari 23 Kecamatan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan antara lain;
 1. Kecamatan Ampibabo tipe A;

2. Kecamatan Balinggi tipe A;
3. Kecamatan Bolano tipe A;
4. Kecamatan Bolano Lambunu tipe A;
5. Kecamatan Kasimbar tipe A;
6. Kecamatan Mepanga tipe A;
7. Kecamatan Moutong tipe A;
8. Kecamatan Ongka Malino tipe A;
9. Kecamatan Palasa tipe A;
10. Kecamatan Parigi tipe A;
11. Kecamatan Parigi Barat tipe A;
12. Kecamatan Parigi Selatan tipe A;
13. Kecamatan Parigi Tengah tipe A;
14. Kecamatan Parigi Utara tipe B;
15. Kecamatan Sausu tipe A;
16. Kecamatan Sidoan tipe A;
17. Kecamatan Siniu tipe A;
18. Kecamatan Taopa tipe A;
19. Kecamatan Tinombo tipe A;
20. Kecamatan Tinombo Selatan tipe A;
21. Kecamatan Tomini tipe A;
22. Kecamatan Toribulu tipe A; dan
23. Kecamatan Torue tipe A.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit

Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah (BLUD). Adapun Rumah sakit yang ada di Kabupaten Parigi Moutong adalah;

- **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**
 1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi
 2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu Tinombo
 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bulunye Napoa'e Moutong

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli. Staf ahli tersebut berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara Administratif di koordinasikan oleh sekretaris Daerah. Adapun Staf Ahli di maksud Antara lain sebagai berikut:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Staf Ahli Bupati bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah

4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong, jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 5.692 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jabatan	Pegawai Negeri Sipil		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Struktural	379	244	623
Jabatan Fungsional	1.152	2.329	3.481
Jabatan Pelaksana	852	736	1.588

Jumlah/Total	2.383	3.309	5.692
---------------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Selain pegawai negeri sipil, pada tahun 2023 sampai dengan 2025 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja berjumlah 1.020 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Jabatan	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Struktural	-	-	-
Jabatan Fungsional	116	188	304
Jabatan Pelaksana	187	529	716
Jumlah/Total	303	717	1.020

Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya Rencana Pembanguana Kabupaten Parigi Moutong. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan peningkatan baik dari segi softskill maupun hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi kualitas/kompetensi SDM.

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal Perubahan RPD berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang

berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan dan diuraikan secara deskriptif-analisis sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 1.7
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya rata- rata lama sekolah	1. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	1. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi standar nasional; 2. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM tenaga kependidikan; 3. Kurangnya ketersediaan alat peraga pendidikan tingkat PAUD (alat permainan edukatif, dll).
		2. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak/belum sekolah	1. Terbatasnya transportasi dari daerah terpencil menuju pusat pendidikan ; 2. Terbatasnya bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.
2	Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH)	1. Kualitas Layanan Kesehatan belum optimal	1. Keterlambatan rujukan karena ibu hamil yang tinggal di pemukiman pegunungan/keadaan Geografis; 2. Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi; 3. Kompetensi Bidan dalam penanganan kegawatdaruratan

			maternal neonatal masih kurang; 4. Rasio tenaga medis persatuan penduduk belum memadai.
		2. Rendahnya kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh masyarakat	1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
		3. Tingginya Prevalensi Stunting	1. Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah; 2. Faktor ekonomi yang rendah, kurangnya asupan gizi bagi balita, sanitasi yang buruk, pola asuh anak yang salah.
3	Belum terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar yang memadai	1. Sistem jaringan infrastruktur belum dapat menunjang pelayanan sosial dan ekonomi secara optimal	1. Kurangnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik; 2. Kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan infrastruktur masih terbatas 3. Tingginya dampak abrasi pantai sepanjang pesisir teluk tomini 4. Belum optimalnya fungsi irigasi 5. Belum optimalnya fungsi drainase
		2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi dan listrik).	1. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi; 2. Belum terpenuhinya Cakupan listrik (rasio elektrifikasi); 3. Cakupan pelayanan air minum di daerah perdesaan dan perkotaan belum memadai.

4	Belum terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar yang mantap	1. Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/disediakan dan prasarana dasar yang ada	1. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni; 2. Masih banyaknya kondisi PSU permukiman yang kurang diperhatikan/terabaikan.
		2. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum ditangani	1. Masih ada lokasi kumuh; 2. Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya.
5	Masih tingginya Indeks Resiko Bencana, dan Indeks Kapasitas Daerah	1. Kinerja pelayanan penanggulangan bencana belum optimal.	1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana secara terpadu dan berkelanjutan belum optimal; 2. Sistem pencegahan dan peringatan dini terhadap bencana belum maksimal dijalankan;
6	Rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Masih rendahnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; 2. Penanganan Sampah belum optimal; 3. Peran serta masyarakat dan rumah tangga dalam pengelolaan sampah belum optimal; 4. Masih Kekurangan sarana dan prasarana penanganan sampah (mobil dum truk dan mobil amrol); 5. Kapasitas TPA semakin terbatas.

7	Belum optimalnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Masih kurangnya pelayanan perizinan terkait penanaman modal	1. Promosi daerah di dalam menarik investasi daerah masih kurang; 2. Kurangnya kompetensi petugas layanan; 3. Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana.
8	Pelaksanaan Reformasi birokrasi yang belum optimal	1. Tata kelola Pemerintahan belum berjalan dengan baik	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang masih relatif besar, berpengaruh pada efisiensi dan efektifitas penganggaran; 2. Masih adanya PD belum memahami secara baik tugas dan fungsinya; 3. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan masih rendah; 4. Belum adanya instrument pengendalian dan pengukuran keberhasilan kebijakan.
9	Tata kelola keuangan daerah yang belum akuntabel	1. Belum optimalnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan Aset daerah	1. Belum terintegrasi secara baik model e-Planning dan e-Budgeting; 2. Kurangnya pengelolaan barang milik daerah ; 3. Adanya keterbatasan SDM yang memiliki pengetahuan yang memadai dalam penerapan akuntansi pemerintahan.
		2. Masih adanya potensi pendapatan pajak yang tidak tercapai.	1. Masih adanya objek pajak yang belum bayar pajak.

10	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Masih kurangnya pemasaran produk dan komoditi unggulan	1. Masih perlunya upaya promosi usaha perdagangan; 2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pasar; 3. Kurangnya inovasi produk yang dihasilkan; 4. Perlunya perluasan pangsa pasar;
		2. Masih rendahnya penerapan Standarisasi dan Perlindungan konsumen	1. Perlunya pelatihan IKM; 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang terhadap tertib niaga; 3. Kurangnya penyelenggaraan pasar murah.
11	Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1. Masih kurangnya pengembangan dan pembinaan IKM	1. Minimnya pembinaan kelompok pengrajin/pelaku industri 2. Kurangnya sarana dan prasarana industri 3. Terbatasnya diversifikasi produk 4. Belum tersedianya sarana informasi IKM
12	Belum optimalnya kontribusi PDRB dari sektor Pertanian	1. Rendahnya nilai tambah Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Menurunnya luas fungsional lahan akibat adanya alih fungsi lahan; 2. Terbatasnya Kualitas SDM Pertanian 3. Masih rendahnya daya saing produk pertanian 4. Penyediaan benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga); 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian

			6. Penerapan teknologi pertanian belum optimal 7. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) akibat adanya Anomali Iklim;
		2. Belum Optimalnya Kapasitas kelembagaan petani	1. Masih perlunya penguatan kelembagaan petani; 2. Kurangnya petugas teknis pertanian/perkebunan.
13	Belum Optimalnya produksi perikanan	1. Masih rendahnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Belum terpenuhi sarana usaha perikanan tangkap; 2. sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan yang belum memadai; 3. Jumlah angka konsumsi ikan yang masih rendah; 4. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat nelayan masih kurang; 5. Armada kapal penangkap ikan masih didominasi oleh kapal penangkap skala kecil; 6. Terbatasnya modal dan bantuan peralatan perikanan pada nelayan.
		1. Masih rendahnya Produksi Perikanan Budidaya	1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi budidaya ikan 2. Keterbatasan infrastruktur 3. Kurangnya penanganan penyakit
14	Belum optimalnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Masih kurangnya pelayanan perizinan terkait penanaman modal	1. Promosi daerah di dalam menarik investasi daerah masih kurang; 2. Kurangnya kompetensi petugas layanan;

			3. Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana.
15	Belum optimalnya pelayanan sosial pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS	1. Masih Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani; 2. Validitas DTKS yang masih belum optimal; 3. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kerawanan sosial masih kurang; 4. Jumlah keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih sangat besar; 5. Banyaknya Jumlah Lansia yang tidak tertangani; 6. Adanya pola hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT) sulit diselesaikan karena faktor budaya masyarakat suku terasing yang masih sulit diubah; 7. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) semakin meningkat; 8. Terbatasnya jumlah tenaga pendamping PKH.

Sumber Data : RPD Kabupaten Parigi Moutong

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. RPD Kabupaten Parigi Moutong 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis berlaku 3 (tiga) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Daerah. RPD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

2.1 Visi dan Misi Kabupaten Parigi Moutong

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025 memuat Visi Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong adalah **“KABUPATEN PARIGI MOUTONG YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 7 (tujuh) misi yang termuat dalam RPD Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal.
4. Mewujudkan pertanian modern dan produktif.
5. Mengembangkan diversifikasi usaha masyarakat berbasis keterampilan sumber daya manusia.
6. Mewujudkan kemampuan memasarkan produk yang dihasilkan daerah.

7. Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihara, asri, aman dan tertib.

Misi diatas menjadi pedoman dalam pembangunan daerah, namun setelah dilakukan penelaahan mendalam, ada beberapa misi yang bisa dikonsolidasikan karena memiliki arti yang hampir sama. Hal ini dapat kita lihat di misi ke 2 (dua) dan misi 5 (lima) di konsolidasi ke misi 3 (tiga) dan misi ke 6 (enam) dapat di konsolidasi di misi ke 3 (tiga) dan di misi 4 (empat). Tujuh misi yang telah dikonsolidasi menjadikan 4 (empat) misi yang dikelompokkan seperti yang termuat di bawah ini:

Misi 1 “Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan, Adil dan Bijaksana”

Misi pertama Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel menggambarkan tujuan Reformasi Birokrasi pembenahan praktik Birokrasi secara komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menciptakan Birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien terhadap aspek organisasi, SDM, prosedur dan peraturan, serta pembenahan pada aspek pengawasan dan akuntabilitas untuk dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan publik. Menata ulang, menyempurnakan dan memperbaiki birokrasi agar menjadi lebih bersih, efisien, efektif dan produktif. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut ada tiga sasaran yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong yaitu indeks reformasi birokrasi dan kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel serta kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien ditunjukkan untuk birokrasi pengelolaan keuangan daerah.

Misi 2 “Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Handal”

Misi ke dua meningkatkan kualitas Manusia yang Berdaya Saing, menggambarkan daya saing sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang ada. Diharapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mampu meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Parigi Moutong di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu

kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing dan kualitas kesehatan yang berdaya saing.

Misi 3 “Mewujudkan Pertanian Modern dan Produktif”

Misi ke tiga meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, menggambarkan Kabupaten Parigi Moutong dengan hasil yang melimpah di sektor pertanian dan perikanan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi harus meningkatkan nilai tambah produk di sektor pertanian dan perikanan. sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Misi 4 ”Mewujudkan Tata Ruang yang Teratur, Lingkungan Hidup yang Seimbang, Terpelihara, Asri, Aman dan Tertib”

Misi ke empat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas perairan, udara, dan tutupan lahan serta meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dengan sasaran menurunnya resiko bencana. Untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan LKjIP Kabupaten Parigi Moutong 2025 adalah untuk mengukur capaian atas tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Parigi Moutong. Adapun sasaran strategis RPD yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Kabupaten Parigi Moutong yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana.	Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel 2. Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien

	2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang handal	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	1. Kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing 2. Kualitas kesehatan yang berdaya saing 3. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
	3. Mewujudkan pertanian modern dan produktif.	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	1. Meningkatnya produksi pertanian 2. Meningkatnya produksi perikanan 3. Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan 4. Meningkatnya investasi daerah
	4. Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihara, asri, aman dan tertib	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	1. Meningkatnya kualitas perairan, udara dan tutupan lahan 2. Menurunnya risiko bencana 1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Pemanfaatan ruang

Sumber Data : RPD Kabupaten Parigi Moutong

2.3. Perjanjian Kinerja

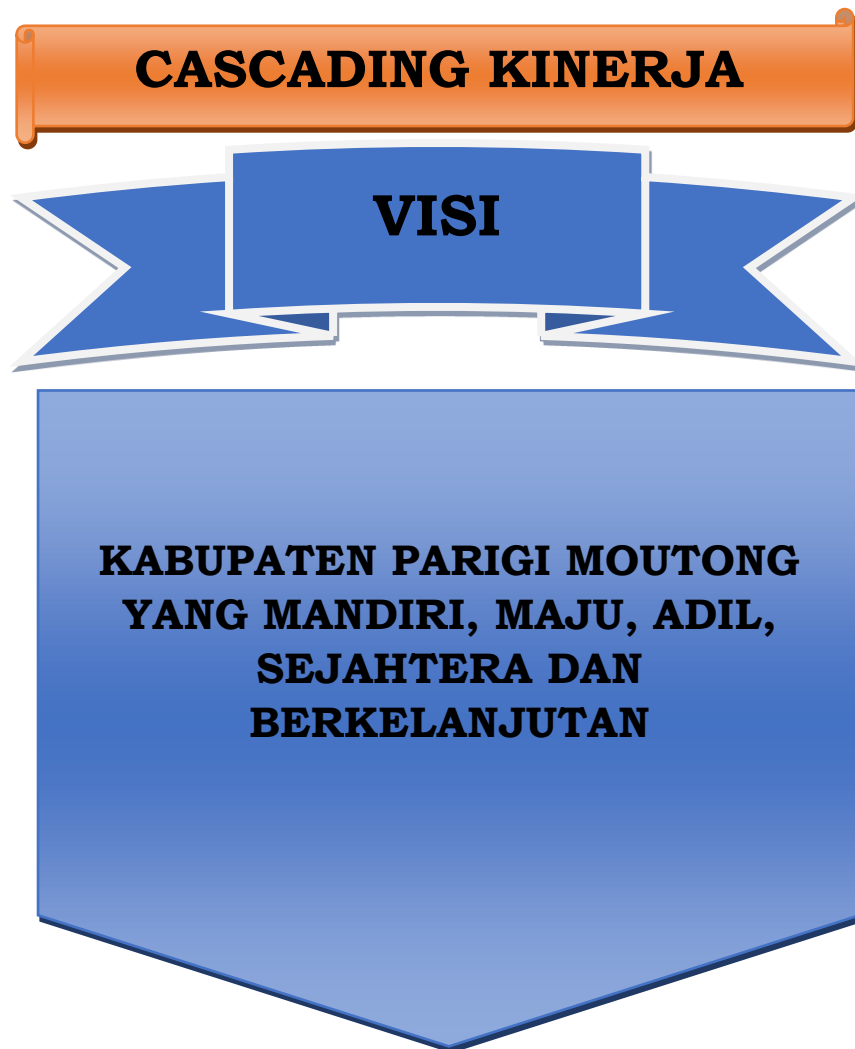
Penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPD Kabupaten Parigi Moutong tertuang dalam indikator kinerja utama yang akan diturunkan dalam perjanjian kinerja Bupati Parigi moutong. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya). Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kabupaten Parigi Moutong dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi, dokumen perencanaan kinerja Bupati Parigi Moutong Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran.

2.4 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Parigi Moutong menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Parigi Moutong, adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Visi Kabupaten Parigi Moutong



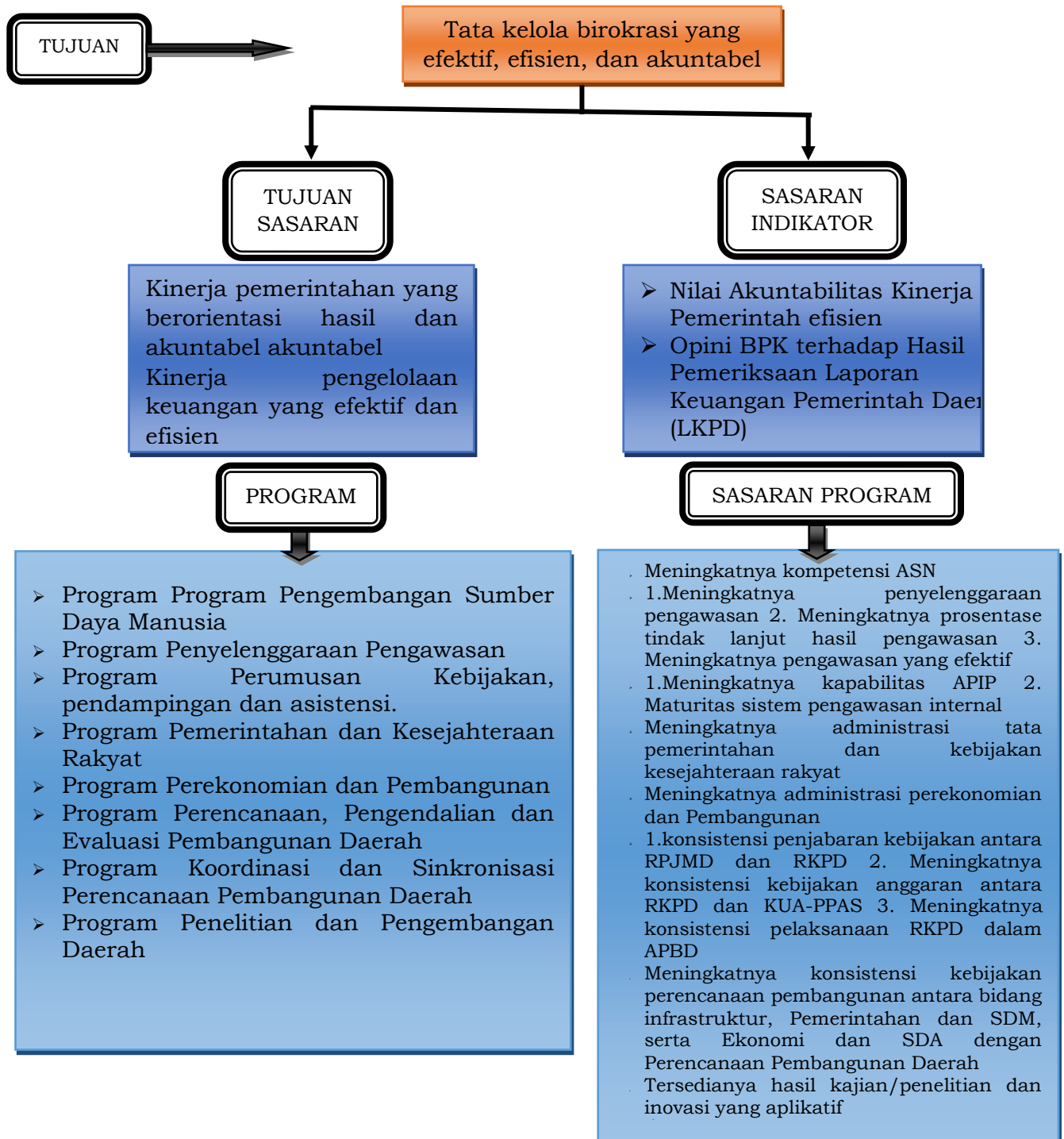
1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang handal
3. Mewujudkan pertanian modern dan produktif.
4. Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihra, asri, aman dan tertib

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2024- 2026

Gambar 2.2 Misi Kabupaten Parigi Moutong

MISI I :

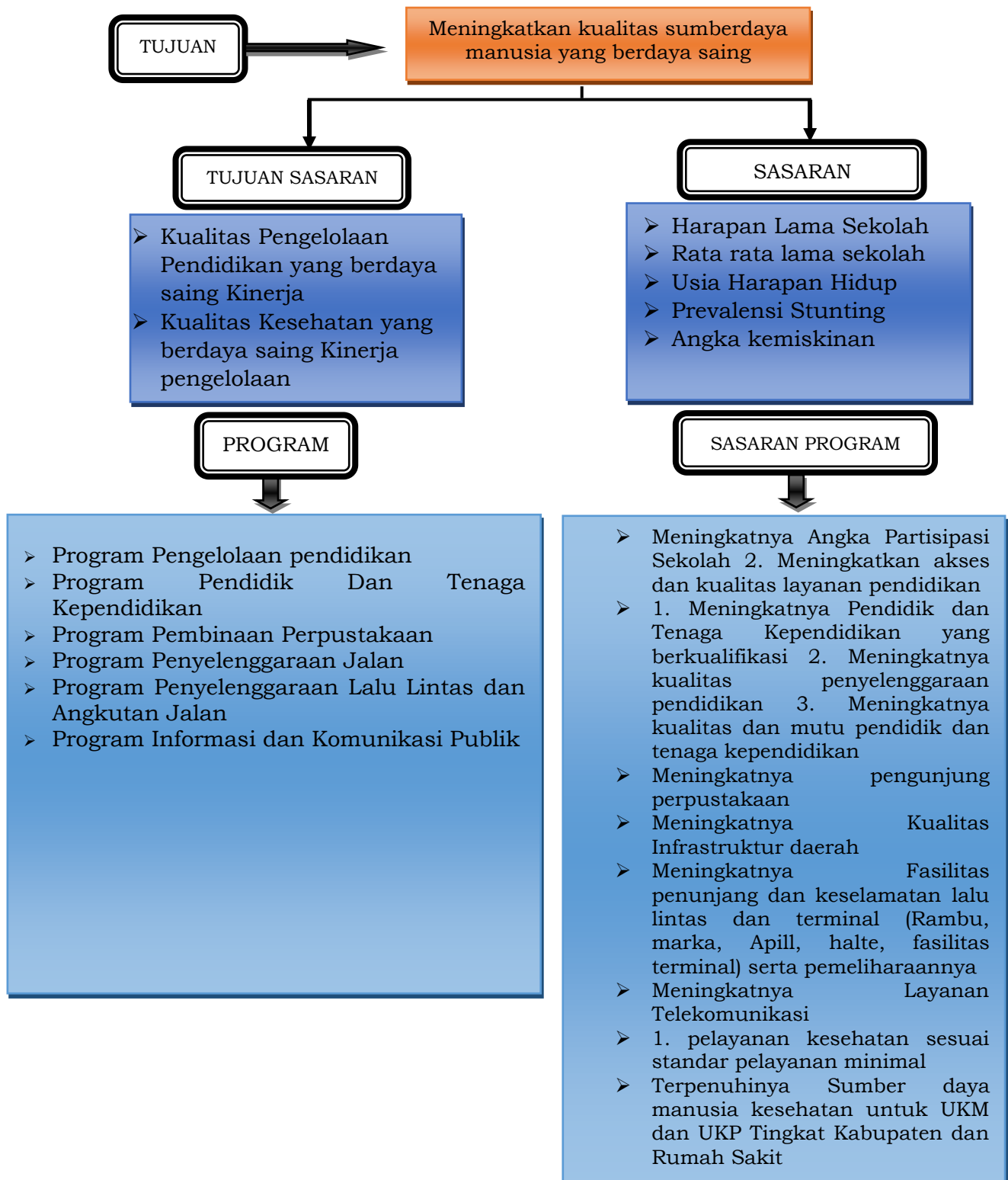
“Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan, Adil Dan Bijaksana”



Gambar 2.3 Cascading Misi I

MISI II :

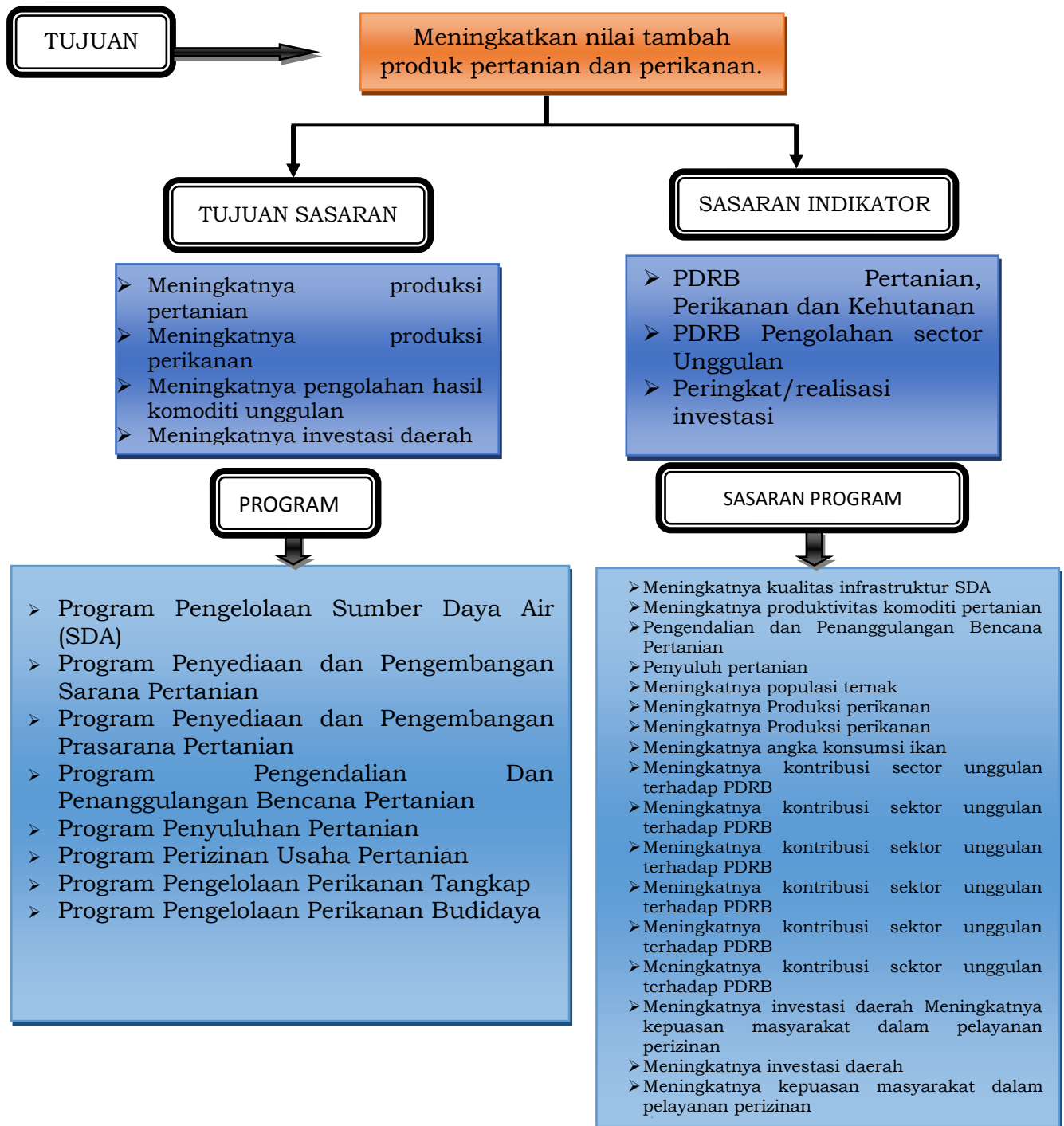
“Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Handal”



Gambar 2.4 Cascading Misi II

MISI III :

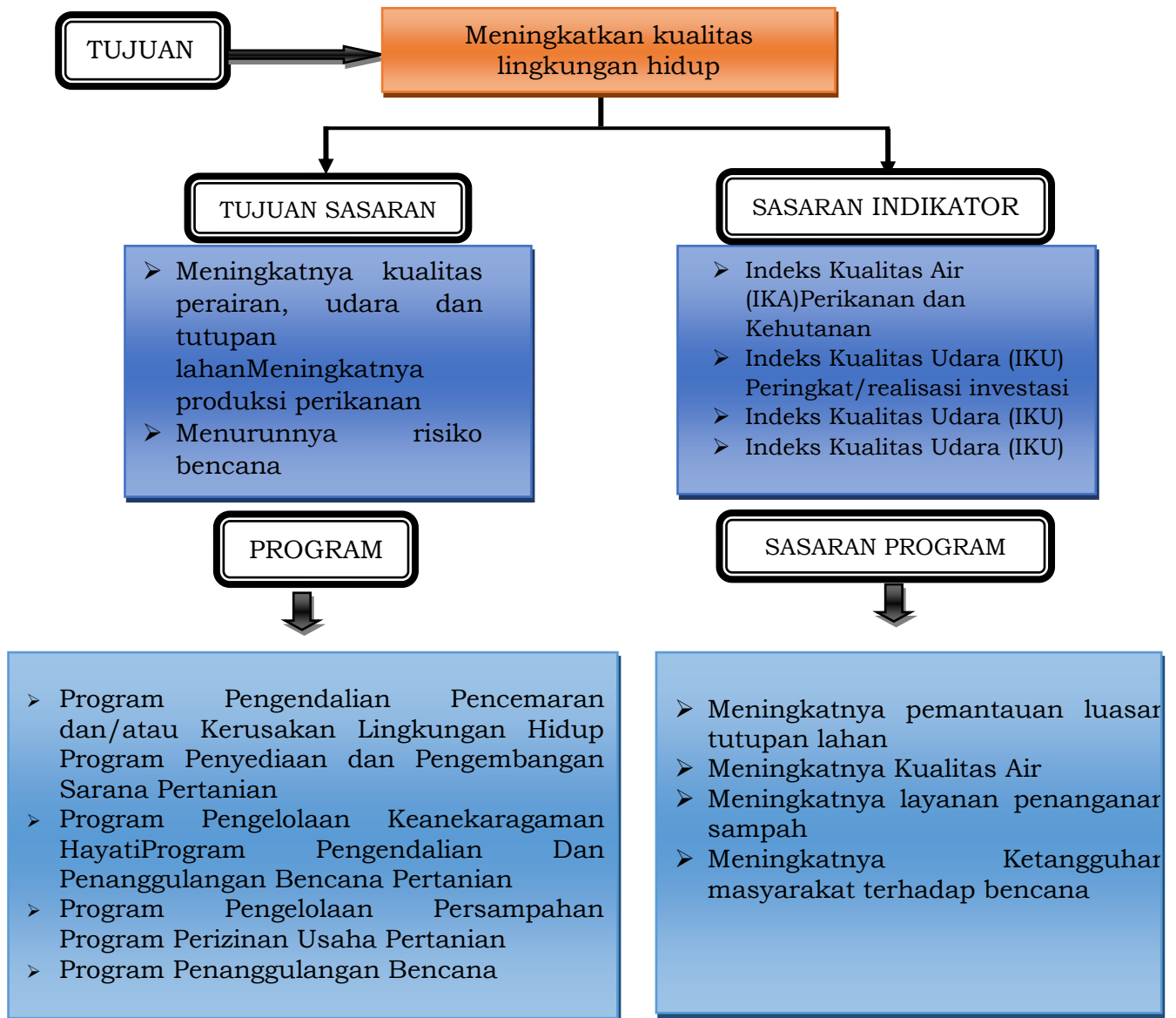
“Mewujudkan Pertanian Modern Dan Produktif”



Gambar 2.5 Cascading Misi III

MISI IV :

“Mewujudkan Tata Ruang Yang Teratur, Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Terpelihara, Asri, Aman Dan Tertib”



Gambar 2.6 Cascading Misi IV

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori dari nilai sebagai berikut:

1. Rumus 1, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \dots$$

2. Rumus 2, apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \dots$$

Sedangkan pemberian kategori pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	Skala Nilai	Keterangan	
1.	$\geq 100\%$	Lebih dari seratus persen	Sangat Berhasil (SB)
2.	75% s.d <100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil (B)
3.	55% s.d <75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil (CB)
4.	<55%	Kurang dari lima puluh	Kurang Berhasil (KB)

		lima persen	
--	--	-------------	--

Sumber Data : Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menentukan ukuran keberhasilan kinerjanya mengacu pada sasaran strategis yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Meskipun belum terdapat penetapan kinerja yang disusun dalam peraturan atau keputusan Bupati Parigi Moutong, namun Indikator sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang dibuat setiap tahun agar pencapaian sasaran strategis untuk mendukung visi dan misi yang termuat dalam RPD dapat dilaksanakan secara maksimal. Berikut merupakan pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam RPD sesuai misi yang telah ditetapkan:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	44	56,48	SB (128)
2	Meningkatnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75	65,36	B (87)
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WDP	B (75)
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,77	69,48	SB (101)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing	Harapan lama sekolah	Tahun	12,56	12,53	B (99,8)
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,97	8,07	SB (101)
6	Meningkatnya kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia harapan hidup	Tahun	67	68,55	SB (102)
		Prevelensi Stunting	Persen	18,68	9,3	SB (150)
7	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	Persen	14,10	13,51	SB (104)
8	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Persen	5,01	3,92	B (78)
9	Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Berlaku Rp. (juta)	10.146.681	11.288.247	SB (111)
			Konstan Rp. (juta)	5.960.886	5.860.032	B (98)
10	Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Berlaku Rp. (juta)	545.437	604.031	SB (111)
			Konstan Rp. (juta)	312.949	311.105	B (99)
11	Meningkatnya investasi daerah	Peringkat/realisasi investasi	Milyar	217.663.158.1	214.951.577.483	B (99)

				91		
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	79,65	84,79	SB (106)
13	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	65,60	78,84	SB (120)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	94,86	90	B (95)
		Indeks tutupan lahan	Poin	78,79	85,36	SB (108)
14	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	108,39	121,08	B (88)
15	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	81	81	SB (100)
16	Meningkatkan ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/Kawasan perkotaan	Persen	19	26	SB (137)

Sumber Data : LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan capaian $\geq 100\%$ dengan kategori sangat berhasil sebanyak 13 target dan target dengan capaian 75% s.d $<100\%$ dengan kategori berhasil sebanyak 9 target.

Berikut ini kami jabarkan target dan capaian sasaran, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, faktor penyebab kegagalan/keberhasilan capaian sasaran, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang tercapainya target sasaran sebagai berikut:

Misi 1	
Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan, Adil Dan Bijaksana	

Capaian sasaran dan indikator misi “Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan, Adil dan Bijaksana” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Pertama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	44,07	62,1	44	56,48
1.2	Meningkatnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil dan	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi	Nilai	64,39	65,27	75	65,36

	akuntabel	Pemerintah (SAKIP)					
1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WDP

Sumber Data : Hasil Evaluasi MENPAN RB 2025 & Hasil Evaluasi BPK RI 2025

1.1 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Sasaran meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, pada tahun 2025 memiliki target 44 poin dan realisasi 56,48 poin sesuai dengan hasil penilaian pelaksanaan evaluasi RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jika dibandingkan dengan target maka dapat disimpulkan bahwa capaian indeks RB memenuhi target dengan capaian 128%. Namun jika realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 indeks RB mengalami penurunan sebesar 5,62 poin.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025 tidak signifikan dilakukan, hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi dari perangkat daerah pengampu indikator RB general dan RB tematik. Pelaksanaan RB yang baik semestinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Parigi Moutong masih jauh dari pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian, semestinya perangkat daerah penanggungjawab RB general dan RB tematik melakukan penyusunan rencana aksi sesuai dengan sasaran masing-masing. Selain rencana aksi, perangkat daerah melakukan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB per triwulan dengan keterlibatan APIP sebagai evaluator kualitas rencana aksi dan capaian rencana aksi eksternal Pemerintah Daerah. Hal tersebut belum maksimal dilakukan oleh perangkat daerah, selain itu pimpinan perangkat daerah tidak berperan

aktif dalam pelaksanaan RB general dan RB tematik pada perangkat daerah masing-masing.

Penurunan capaian RB pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh komponen capaian indikator penilaian RB general, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Reformasi Birokrasi General

No	Indikator Penilaian	Bobot	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	0	1,96	1,71
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	0	4,57	0
3.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	0	0	0
4.	Tingkat Maturitas SPIP	4	2,49	2,26	2,26
5.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.5	0	0	0
6.	Nilai SAKIP	4	2,58	2,61	2,61
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	0	0	0
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	0,69	0,73	1,41
9.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	0,5	1,0	0,50
10.	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	0	0	0
11.	Indeks Reformasi Hukum	2.5	1,37	2,18	2,19
12.	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	0,5	1,07	1,07
13.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	0,8	1,49	1,52
14.	Indeks Sistem Merit	4	0,43	0,43	0,43
15.	Indeks Pelayanan Publik	2	0,83	1,27	1,18
16.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	0,84	1,66	1,66
17.	Indeks SPBE	9	4,82	4,90	4,89
18.	Opini BPK	5	5	3,33	3,33
19.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	2,42	2,64	2,79
20.	Indeks BerAkhlaq	4	2,48	2,79	2,79
21.	Survei Penilaian Integritas	10	6,96	6,65	7,28
22.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	6,67	7,07	6,94
22.	Capaian IKU Makro	4	N/A	3,21	3,22
23.	Capaian IKU Non Makro	6	N/A	3,54	0

Sumber Data : Portal Reformasi Birokrasi 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 indikator penilaian yang tidak mendapatkan nilai atau tidak dilakukan penilaian, selain itu terdapat 8 indikator yang mengalami penurunan sehingga berdasarkan hasil akumulasi penilaian di atas menjadi satu komponen penilaian RB.

Dari pelaksanaan RB dan capaian indikator penilaian pada tahun 2025 dapat ditarik beberapa poin penting, antara lain:

- a. Masih kurangnya partisipasi dari perangkat daerah Penanggungjawab RB general dan RB tematik;
- b. Perangkat daerah belum memahami pelaksanaan penyusunan rencana aksi RB general dan RB tematik sehingga menghasilkan rencana aksi yang tidak maksimal;
- c. Perangkat daerah belum melaporkan realisasi pelaksanaan rencana aksi sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan baik;
- d. APIP belum sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta masih kurang pahami APIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal; dan
- e. Indikator penilaian RB general dan RB tematik belum sepenuhnya termuat dalam indikator kinerja perangkat daerah.

Dari permasalahan dan kendala di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu

- a. Melakukan penyusunan dan penetapan Surat Keputusan Bupati tentang SK TIM Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Parigi Moutong;
- b. Melakukan rapat/sosialisasi kepada perangkat daerah akan pentingnya pelaksanaan RB di lingkungan perangkat daerah;
- c. Melakukan desk penyusunan rencana aksi dan realisasi rencana aksi secara periodisasi;
- d. Mendorong pimpinan untuk memperkuat peran APIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal RB serta melakukan peningkatan kompetensi APIP guna mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB.

- e. Mendorong Badan Perencanaan Daerah untuk memasukkan indikator RB ke dalam dokumen perencanaan Kabupaten yang kemudian diturunkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.

1.2 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Yang Berorientasi Hasil dan Akuntabel

Sasaran meningkatnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil dan akuntabel dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), pada tahun 2025 memiliki target sebesar 75 dengan realisasi sebesar 65,36. Realisasi penilaian AKIP tertuang dalam Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/519/AA.05/2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Jika mebandingkan antara target dengan realisasi tahun 2025, capain nilai AKIP 2025 tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 87% dengan kategori capaian berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi nilai AKIP mengalami kenaikan sebesar 0,09 dengan realisasi tahun 2024 sebesar 65,27.

Berdasarkan hasil penilain 2025 kenaikan nilai AKIP tidak signifikan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Parigi Moutong perlu dilakukan perbaikan pada setiap komponen penilaian, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Adapun capaian AKIP berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Komponen Penilaian AKIP

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,82	21,94
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,13	20,31
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,38	9,49
4.	Evaluasi Internal	25	13,94	13,62
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,27	65,36

Sumber Data : Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada komponen penilaiain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja mengalami kenaikan sedangkan pada komponen evaluasi internal mengalami penurunan.

Tentunya dari keempat komponen tersebut perlu dilakukan perbaikan secara konsisten, meskipun dari ketiga komponen mengalami kenaikan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Tentunya dalam pelaksanaan AKIP di Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan upaya perbaikan, pada sektor perencanaan kinerja melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan perangkat daerah dari renstra, renja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, rencana aksi, pohon kinerja, casecading dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pada komponen pengukuran kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja yang konsisten dan berkelanjutan, hal tersebut belum dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hal tersebut sehingga pengukuran kinerja perlu menjadi prioritas utama dalam memperbaiki pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Pada komponen pelaporan kinerja belum konsistennya perangkat daerah dalam menyusun laporan kinerja serta dokumen laporan kinerja belum sesuai dengan permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selain itu sumber daya manusia yang menangani pelaporan kinerja masih sangat minim sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan penyusunan laporan kinerja. Pada komponen evaluasi internal belum dilakukan evaluasi secara keseluruhan, sehingga APIP perlu melakukan evaluasi internal secara konsisten. Selain itu sumber daya manusia yang melaksanakan evaluasi internal sangat terbatas serta perlu peningkatan kompetensi.

Dari pelaksanaan AKIP dan capaian indikator penilaian pada tahun 2025 dapat ditarik beberapa poin penting, antara lain:

- a. Masih terdapat perencanaan kinerja baik dalam rumusan tujuan maupun sasaran strategis yang belum berorientasi pada hasil. Selain itu, penetapan rumusan tujuan atau sasaran strategis, belum diikuti dengan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART-C. Sehingga, sebagian alur logika antara isu strategis, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja masih belum menggambarkan perubahan yang ingin dicapai secara terukur.

- b. Penyusunan rencana aksi pada perangkat daerah belum berorientasi pada langkah aksi substantif yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja di atasnya. Rencana aksi yang disusun belum menggambarkan tahapan perubahan yang perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian outcome, sehingga fungsi rencana aksi sebagai alat kendali kinerja menjadi kurang optimal.
- c. Pohon kinerja/*logframe* yang disusun masih bersifat indikator dan belum sepenuhnya mengikuti prinsip penyusunan pohon kinerja, seperti belum terlihat adanya identifikasi *Critical Success Factor* (CSF) pada *logframe* yang disusun. Sehingga belum terlihat hubungan kinerja sebab-akibat yang logis dan relevan dari level organisasi hingga unit serta individu. Tanpa adanya struktur yang runtut dan berbasis CSF, terdapat risiko bahwa sasaran, indikator dan program/kegiatan belum sepenuhnya terarah dan selaras terhadap pencapaian kinerja organisasi.
- d. Indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) baik pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, serta sumber data yang relevan. Ketidakjelasan sumber data ini menyebabkan proses pemantauan dan evaluasi sulit dilakukan serta menimbulkan potensi perbedaan interpretasi dalam penghitungan capaian kinerja.
- e. Terdapat penggunaan indikator kinerja yang baru dan belum sepenuhnya mencerminkan substansi sasaran yang ingin dicapai. Beberapa indikator tersebut belum memiliki keterkaitan yang relevan dengan makna sasaran, serta berpotensi berada diluar intervensi Pemerintah Daerah.
- f. Mekanisme pengukuran kinerja belum berjalan dengan baik, belum terdapat metode dialog kinerja secara berkala, baik melalui forum tatap muka maupun melalui sistem informasi pengukuran kinerja serta belum optimalnya pengukuran kinerja membuat proses pemantauan, penyelesaian masalah, dan pengendalian capaian kinerja belum terkawal dengan baik.

- g. Hasil dari proses pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara memadai untuk melakukan penyesuaian strategi, program, maupun intervensi yang akan dilakukan. Proses monitoring cenderung berhenti pada pelaporan capaian, tanpa diikuti dengan perbaikan langkah aksi.
- h. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan laporan kinerja.
- i. Pada sebagian perangkat daerah, pelaporan kinerja masih sebatas menyajikan tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja, tanpa disertai analisis naratif yang memadai untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja serta makna capaian tersebut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- j. Pelaksanaan evaluasi internal masih sebatas pada ruang lingkup Pelaporan Kinerja, belum dilaksanakan utuh pada 4 komponen penilaian AKIP. Hal ini mengakibatkan, hasil evaluasi internal menjadi tidak valid untuk memotret bagaimana implementasi siklus SAKIP secara keseluruhan di perangkat daerah.

Dari permasalahan dan kendala di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu

- a. Memastikan rumusan tujuan dan sasaran pada perencanaan kinerja, baik level Pemda maupun Perangkat Daerah agar berorientasi pada outcome, dengan memastikan formulasi kinerja mencerminkan perubahan yang ingin diwujudkan. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja agar selaras dengan hasil sehingga benar-benar mencerminkan perubahan yang ingin dicapai dan dapat dipantau secara konsisten.
- b. Melakukan rewiu penyusunan rencana aksi yang berfokus pada langkah-langkah yang secara langsung mendorong pencapaian sasaran hasil, bukan sekadar aktivitas rutin maupun berbasis anggaran semata, sehingga dapat dipastikan bahwa alur dari pencapaian kinerja terlihat logis dan jelas.
- c. Menata ulang proses penjenjangan/cascading kinerja dengan menyusun terlebih dahulu pohon kinerja/ *logframe* melalui identifikasi CSF berdasarkan analisis data dan bukti yang menggambarkan faktor

pengungkit kinerja yang paling berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Penyusunan CSF harus mencerminkan kondisi riil instansi, bukan bersifat normatif, sehingga faktor pengungkit pencapaian kinerja yang paling berpengaruh dapat teridentifikasi secara tepat.

- d. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong agar menyusun Indikator Kinerja Utama dengan memastikan seluruh indikator memiliki definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data yang relevan, spesifik, kredibel dan konsisten untuk setiap indikator kinerja. Penyesuaian ini menjadi penting agar proses pengukuran kinerja tahunan maupun berkala dapat berjalan lebih akurat.
- e. Memastikan bahwa setiap indikator baru memiliki metadata pengukuran yang jelas dan relevan, agar indikator tersebut dapat diukur secara konsisten, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Menetapkan prosedur pemantauan kinerja secara berkala dengan membangun mekanisme dialog kinerja yang terjadwal secara berkala, baik dalam bentuk pertemuan langsung maupun melalui sistem informasi yang memungkinkan pelacakan capaian secara rutin, sehingga proses pemantauan kinerja benar-benar menjadi wadah pengambilan keputusan untuk mengoreksi apabila terdapat deviasi kinerja.
- g. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja bukan hanya dilaporkan, namun betul-betul dijadikan dasar dalam menyesuaikan strategi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- h. Menetapkan standar dan mekanisme internal yang jelas, terkait batas waktu penyusunan dan pengumpulan laporan kinerja Perangkat Daerah, sebagai acuan seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah disusun tepat waktu dan memenuhi standar sistematika penulisan laporan kinerja.
- i. Memperkuat kualitas dan struktur pelaporan kinerja dengan melengkapi laporan kinerja dengan unsur analisis evaluatif, antara lain analisis tren capaian, faktor pendorong dan penghambat, sehingga laporan kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai

kualitas pencapaian kinerja dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

- j. Mendorong pimpinan untuk meningkatkan kapasitas evaluator internal terhadap pemahaman mengenai prinsip evaluasi internal, untuk memastikan evaluasi internal AKIP dilaksanakan pada seluruh ruang lingkup sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Penguatan ini penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis yang valid dan dapat ditindaklanjuti terkait dengan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

1.3 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Yang Efektif dan Efisien

Opini yang diberikan oleh BPK adalah hasil dari evaluasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, serta menunjukkan seberapa baik Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Opini ini memiliki gambaran yang sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Pada sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja opini Badan Pemeriksa Keuangan, pada tahun 2025 memiliki target WTP dengan realisasi WDP. Hal tersebut mencerminkan belum tercapainya target yang direncanakan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini WDP. Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dengan opini WDP merupakan hasil yang seyogyanya perlu dilakukan evaluasi sehingga menghasilkan penilaian WTP. Penyebab utama pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah WDP yaitu manajemen aset yang belum optimal serta penatausahaan belanja yang perlu perbaikan. Pencatatan aset di Kabupaten Parigi Moutong tidak akurat, selain itu lemahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi pada tingkat perangkat daerah menyebabkan kesalahan dalam penginputan data dan rekonsiliasi anggaran. Masalah sistem informasi yang belum terintegrasi secara penuh juga menjadi kendala, di

mana data dari aplikasi perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan seringkali tidak sinkron, sehingga memicu selisih angka yang sulit dijelaskan saat proses audit berlangsung.

Dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan capaian indikator opini BPK pada tahun 2025 dapat ditarik beberapa poin penting, antara lain:

- a. Lemahnya sistem pengendalian intern pengawasan berjenjang yang tidak berjalan maksimal sehingga penyimpangan administratif baru ditemukan di akhir tahun anggaran. Pengawasan dan pengendalian internal yang lemah sering menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran, pemborosan, dan bahkan potensi korupsi. Tanpa sistem pengendalian yang baik, pengelolaan keuangan daerah menjadi rentan terhadap manipulasi atau penyimpangan.
- b. Permasalahan hibah dan bansos berupa ketidakmampuan penerima hibah dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu, yang secara otomatis membebani laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Kualitas bukti pendukung yang belum maksimal seperti transaksi belanja yang tidak didukung oleh bukti otentik yang valid, sehingga auditor tidak dapat meyakini kewajaran nilai transaksinya.
- d. Masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak dapat menunjukkan atau mengelola aset daerah secara jelas dan akurat. Misalnya, aset tanah, gedung, atau kendaraan dinas tidak tercatat dengan baik atau tidak dilaporkan secara lengkap.
- e. Perangkat Daerah yang tidak segera menindaklanjuti temuan-temuan dari audit sebelumnya atau tidak memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam sistem pengelolaan keuangan.
- f. Belum tertibnya dalam administrasi keuangan, seperti pencatatan yang tidak sesuai atau tidak tepat waktu, pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur, atau ketidakakuratan dalam penghitungan anggaran.
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, sehingga masih terdapat

ASN yang terjerat masalah hukum serta terdapat temuan BPK terkait kelebihan pembayaran pada Perangkat Daerah.

Dari permasalahan dan kendala di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan intensif mengenai standar akuntansi pemerintahan bagi bendahara dan pengelola keuangan di setiap perangkat daerah.
- Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan memastikan seluruh catatan dari tahun sebelumnya diselesaikan 100%, karena pengulangan kesalahan yang sama akan memperburuk penilaian BPK.
- Melakukan digitalisasi laporan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pelaporan pajak dan transaksi non-tunai demi transparansi yang lebih tinggi.

Misi 2
Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Handal

Capaian sasaran dan indikator misi “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Handal” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Kedua

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
2.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,06	69,48	68,77	69,48
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing	Harapan lama sekolah	Tahun	12,51	12,52	12,56	12,53
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,04	8,05	7,97	8,07
2.3	Meningkatnya kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia harapan hidup	Tahun	68,62	68,72	67	68,55
		Prevelensi Stunting	Persen	10	8,7	18,68	9,3
2.4	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	Persen	14,91	14,20	14,10	13,51

Sumber Data : LKjIP Perangkat Daerah & Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

2.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kualitas hidup masyarakat secara komprehensif. Dalam laporan kinerja pemerintah, IPM tidak hanya dilihat sebagai angka statistik, melainkan sebagai cermin dari efektivitas kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi penduduk. IPM memiliki relevansi dengan indikator lain yang terdapat pada misi kedua Rencana Pembangunan Daerah, indikator lain yang dimaksud yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, prevalensi stunting dan angka kemiskinan. Keberhasilan realisasi IPM tergantung dari indikator pendukung yang telah disebutkan di atas, sehingga faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IPM akan tertuang didalam indikator pendukung tersebut.

Target IPM pada tahun 2025 sebesar 68,77 poin dengan realisasi sebesar 69,48 poin, sehingga jika dikonversi dalam persenan capaian kinerja sebesar 101% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 IPM Kabupaten Parigi Moutong tidak mengalami kenaikan/penurunan artinya nilai 2024 dengan 2025 sama, namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 IPM mengalami kenaikan sebesar 0,42 poin dengan realisasi 2023 sebesar 67,06 poin. Hal tersebut mencerminkan nilai IPM yang sangat baik serta sesuai dengan target perencanaan Pemerintah Daerah.

2.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Yang Berdaya Saing

Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing terdapat dua indikator kinerja yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator kinerja harapan lama sekolah, pada tahun 2025 memiliki target sebesar 12,56 tahun dan realisasi sebesar 12,53 tahun, jika dikonversi kedalam persentase capaian kinerja sebesar 99,8 persen dengan kategori baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 12,52 tahun, terjadi kenaikan sebesar 0,01 tahun. Pada

tahun 2025 indikator rata-rata lama sekolah memiliki target sebesar 7,97 tahun dengan realisasi sebesar 8,07 tahun, persentase capaian kinerja sebesar 101% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 8,05 tahun, terdapat kenaikan sebesar 0,02 tahun.

Capaian indikator kinerja harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tidak terlepas atas peran penting tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, meskipun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Parigi Moutong belum merata, Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan perbaikan baik dari segi pemenuhan tenaga melalui pengadaan PPPK, melakukan peningkatan kompetensi dan melakukan peningkatan kesejahteraan serta peningkatan sarana prasarana pendukung pengajaran. Tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Parigi Moutong baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik di tingkat sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan

No	Jenjang	Status	Jumlah				Total Guru	Jumlah Guru Perjenjang	Jumlah Tendik	Jumlah Guru Dan Tendik
			PNS	P3K	Kontrak	Honor Sekolah				
1	TK/PAUD	Negeri	13	15	-	88	116	664	11	697
		Swasta	32	1	-	515	548		22	
2	SD	Negeri	1099	491	-	1283	2873	3276	455	3778
		Swasta	148	60	-	195	403		47	
3	SMP	Negeri	524	298	-	588	1410	2748	237	3016
		Swasta	520	298	-	520	1338		31	
6	SKB/PKBM	Negeri	2			3		5		5
		Swasta								
JUMLAH								6.693	803	7.496

Sumber Data : LKjIP Dinas Pendidikan & Kebudayaan 2025

Data mengenai jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan total 7.496 orang. Komposisi tenaga ini didominasi oleh pendidik (guru) sebanyak 6.693 orang atau sekitar 89,3%, sedangkan tenaga kependidikan berjumlah 803 orang atau 10,7%. Proporsi ini menunjukkan bahwa tenaga pengajar merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan, sementara tenaga kependidikan berperan sebagai pendukung administrasi dan operasional sekolah.

Sumber tenaga pendidikan dan kependidikan memperlihatkan kontribusi yang signifikan dari sektor pemerintah. Dari total 7.496 tenaga, sebanyak 5.107 orang atau 68,1% berasal dari lembaga pemerintah, sementara sisanya, yaitu 2.389 orang atau 31,9%, berasal dari lembaga pendidikan swasta. Distribusi ini menegaskan peran pemerintah sebagai penyedia utama tenaga pendidikan, sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong.

Distribusi tenaga pendidik dan kependidikan menurut jenjang pendidikan menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tingkat PAUD, jumlah tenaga mencapai 697 orang, terdiri dari 127 orang dari pemerintah dan 570 orang dari swasta. Pada tingkat SD, jumlah tenaga meningkat secara substansial menjadi 3.778 orang, dengan mayoritas berasal dari pemerintah sebanyak 3.328 orang dan sisanya 450 orang dari swasta. Jenjang SMP memiliki 3.016 tenaga, dengan komposisi 1.647 orang dari pemerintah dan 1.369 orang dari swasta. Di tingkat SKB/PKBM, jumlah tenaga relatif kecil, yaitu 5 orang, semuanya berasal dari pemerintah. Analisis tingkat kecukupan guru dan tendik menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Mutong secara umum tidak mengalami kekurangan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Tantangan utama terletak pada pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi profesional dan penguatan tenaga kependidikan. Strategi pembangunan pendidikan yang efektif memerlukan penataan sumber daya manusia secara efisien dan berkeadilan, penyesuaian rasio guru-murid berdasarkan kebutuhan wilayah, serta penguatan kapasitas administrasi sekolah.

Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan tanpa harus menambah jumlah guru secara signifikan, dengan fokus pada pemerataan layanan dan optimalisasi kompetensi profesional.

Analisis demografi Kabupaten Parimutong berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok usia 0–19 tahun memiliki distribusi yang relatif seimbang, meskipun karakteristik wilayah yang berbukit dan terpencil memengaruhi pola distribusi penduduk dan akses terhadap layanan pendidikan. Estimasi jumlah anak usia sekolah menekankan tekanan pada sistem pendidikan dasar dan menengah pertama. Anak usia PAUD/TK (3–6 tahun) diperkirakan berjumlah sekitar 22,4 ribu jiwa, usia SD (7–12 tahun) sekitar 22,0 ribu jiwa dan usia SMP (13–15 tahun) sekitar 18,4 ribu jiwa. Estimasi ini didasarkan pada proporsi parsial dari kelompok usia yang tersedia, menggunakan asumsi distribusi yang konsisten dengan pola nasional, sehingga dapat dijadikan acuan awal dalam perencanaan kebutuhan pendidikan. Adapun estimasi rasio guru dan murid berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rasio Guru dan Murid

Jenjang	Estimasi Murid (ribu)	Total Guru (Negeri & Swasta)	Rasio Murid : Guru	Standar Ideal Rasio
PAUD/TK	22,4	1.212	18,5	15–20
SD	22,0	3.276	6,7	20–28
SMP	18,4	2.748	6,7	24–32

Sumber Data : LKjIP Dinas Pendidikan & Kebudayaan 2025

Rasio murid per guru mengindikasikan perbedaan kapasitas layanan antar jenjang pendidikan. Jenjang PAUD/TK memiliki rasio murid per guru sekitar 18,5, yang masih berada dalam batas standar ideal nasional (15–20 anak per guru). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, tenaga pengajar pada pendidikan usia dini cukup memadai. Distribusi guru yang tidak merata tetap menjadi tantangan, khususnya di wilayah terpencil, karena kualitas layanan pendidikan dipengaruhi tidak hanya oleh jumlah guru tetapi juga akses dan pemerataan distribusi.

Pada jenjang SD dan SMP, rasio murid per guru masing-masing mencapai sekitar 6,7 anak per guru, jauh di bawah standar nasional (SD: 20–28 anak per guru; SMP: 24–32 anak per guru). Temuan ini menandakan adanya kelebihan guru secara kuantitatif. Kelebihan guru tersebut dapat mengindikasikan penumpukan tenaga pengajar di pusat kota atau distrik tertentu, sementara sekolah di lokasi terpencil masih berpotensi mengalami kekurangan guru. Analisis ini menyoroti pentingnya strategi penempatan guru yang mempertimbangkan kesenjangan geografis dan aksesibilitas, sehingga rasio guru-murid lebih optimal secara wilayah dan bukan hanya secara total.

Berdasarkan pelaksanaan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan yang berdaya saing dapat disimpulkan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Secara kuantitatif terdapat kelebihan jumlah guru yang sangat signifikan, khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SMP dengan rasio sebesar 6,7% (jumlah siswa dibandingkan dengan jumlah guru), sedangkan standar ideal nasional berada pada 20-32%. Artinya Pemerintah Daerah tidak kekurangan guru khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SMP hanya saja distribusi yang tidak merata menyebabkan penumpukan guru di daerah tertentu serta kekurangan guru di daerah lain.
- b. Sumber daya manusia guru yang belum memenuhi standar ditemukan khususnya pada jenjang pendidikan PAUD/TK dan SD yang dimana terdapat 163 guru PAUD/TK (swasta) non S1, 800 guru SD (swasta) non S1 dan 355 guru SD (negeri) non S1.
- c. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum terakreditasi atau memiliki status Tidak Terakreditasi (TT). Hal tersebut terdapat pada satuan pendidikan tingkat PAUD/TK Negeri, terdapat 48 sekolah yang belum memenuhi standar.
- d. Belum maksimalnya sarana prasarana pendidikan khususnya ruang kelas SD, terdapat 405 ruang kelas yang rusak berat dan 535 ruang kelas yang rusak ringan. Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Palasa memiliki angka kerusakan ruang kelas yang cukup menonjol.

Dari tantangan dan permasalahan di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu:

- a. Melakukan redistribusi guru berdasarkan wilayah serta melakukan pemetaan ulang posisi guru dari wilayah yang surplus guru ke wilayah yang defisit, selain itu akan menyiapkan pemberian insentif khusus atau fasilitas tempat tinggal bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit.
- b. Mempermudah layanan kepegawaian (tugas belajar) khusus guru non S1 untuk melanjutkan studi kejenjang sarjana baik itu melalui beasiswa/kerjasama daerah dan biaya mandiri. Peningkatan kompetensi juga dilakukan melalui pelatihan profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
- c. Melakukan pendampingan akreditasi dengan didampingi oleh tim akreditasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan serta mengoptimalkan peran tendik dalam mendukung administrasi sekolah agar proses dokumentasi akreditasi berjalan lebih efisien.
- d. Melakukan rehabilitasi ruang kelas dengan skala prioritas berdasarkan data ruang kelas yang mengalami rusak berat pada Kecamatan dengan kerusakan terbanyak seperti Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Palasa. Serta memastikan alokasi dana pemeliharaan rutin dianggarkan untuk perbaikan ruang kelas yang mengalami rusak ringan.

2.3 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Yang Berdaya Saing

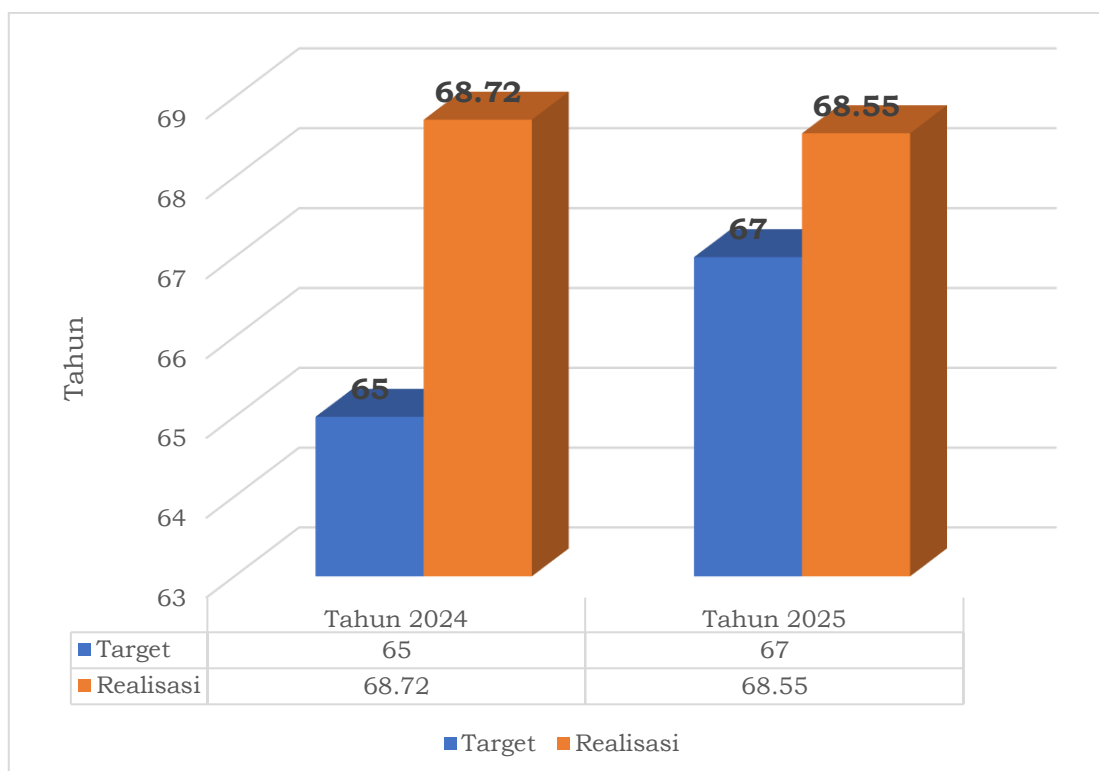
Pada sasaran meningkatnya kualitas kesehatan yang berdaya saing dengan indikator kinerja usia harapan hidup dan prevalensi stunting. Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa seorang individu. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Penghitungan berdasarkan serangkaian *age specific rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan

hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 yang menunjang pencapaian dan tujuan pemerintah daerah pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian kinerja UHH ini menjadi salah satu gambaran keberhasilan program di bidang kesehatan tahun 2025. Cara Menghitung capaian kinerja UHH, menggunakan perhitungan yaitu:

$$\text{Usia Harapan Hidup (UHH)} = \frac{\text{Jumlah Umur Orang Meninggal}}{\text{Jumlah Orang Meninggal}}$$

Adapun trend realisasi capaian kinerja UHH Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2025 dapat dilihat pada grafik atau gambar dibawah ini:



Gambar 3.1
Trend Capaian Kinerja UHH Tahun 2024-2025

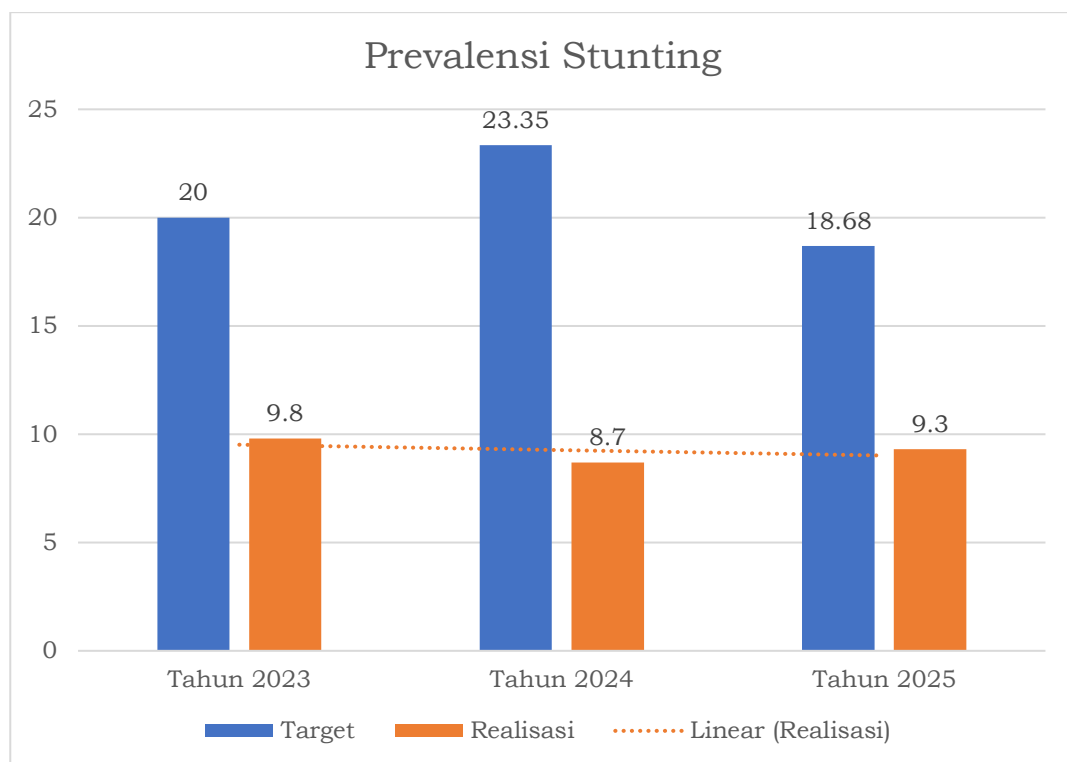
Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian kinerja UHH pada Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025 berkinerja sangat baik sebagaimana kriteria pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Prevalensi Stunting merupakan salah satu indikator capaian keberhasilan kinerja yang terdapat pada RPD 2024-2026 Kabupaten Parigi Moutong. Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Stunting merupakan salah satu indikator yang menjadi prioritas secara nasional. Untuk menghitung prevalensi stunting dapat diukur melalui cara yaitu:

$$\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita yang di ukur}} \times 100$$

Realisasi Indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

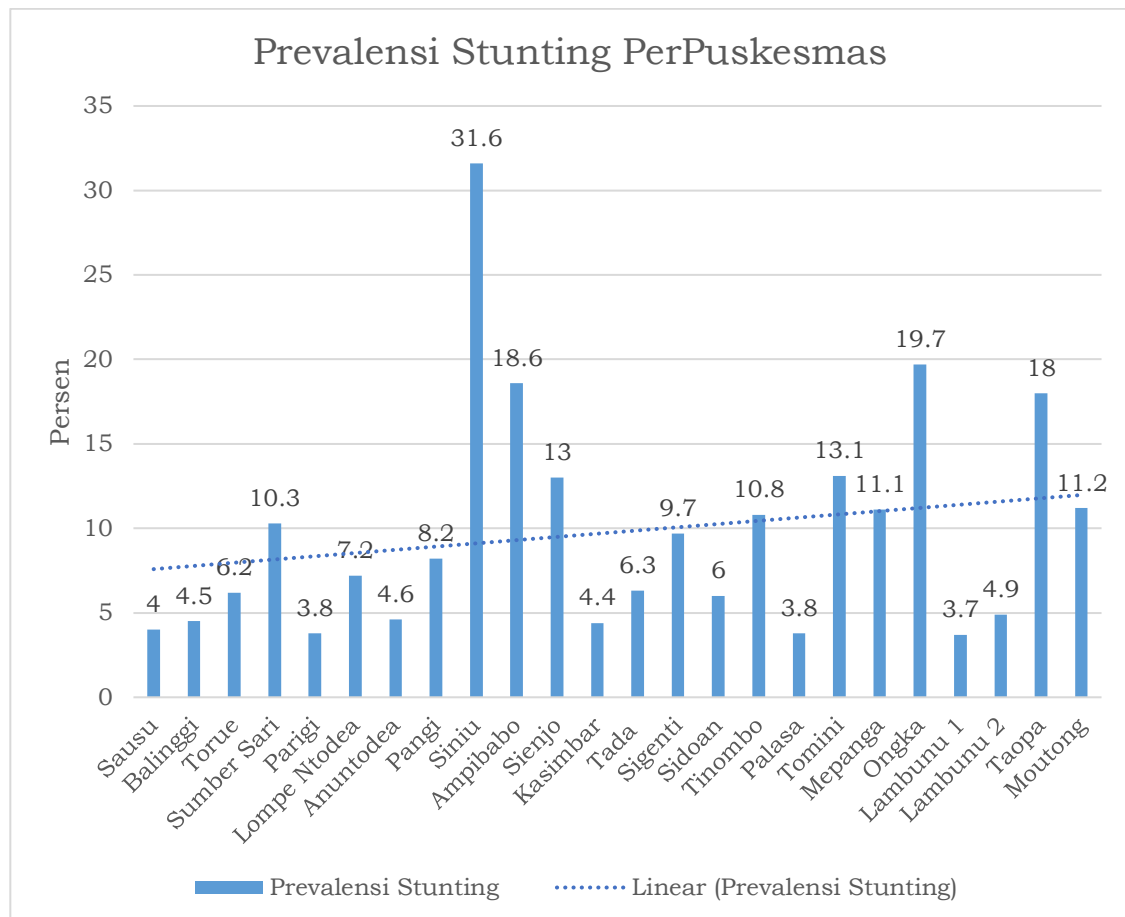


Gambar 3.2
Trend Prevalensi Stunting Tahun 2023-2025

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

Grafik prevalensi stunting menunjukkan bahwa realisasi prevalensi stunting selama periode tahun 2023–2025 melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, target prevalensi stunting sebesar 20%

dengan realisasi sebesar 9,8%. Pada Tahun 2024, target menurun menjadi 23,35 persen, sementara realisasi melebihi target yaitu sebesar 8,7%. Selanjutnya pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 18,68% dan realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 9,3%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja prevelensi stunting, pada 3 tahun terakhir mengalami tren yang sangat baik dan melampaui target perencanaan kinerja. Sebaran prevalensi stunting perpuskesmas tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.3
Sebaran Prevalensi Stunting Perpuskesmas Tahun 2025

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa sebaran prevalensi stunting tahun 2025, angka tertinggi terjadi di puskesmas Siniu dengan angka sebesar 31,6% dan angka terendah berada pada puskesmas Lambunu 1 dengan angka sebesar 3,7%.

Selain itu dalam mencapai target kinerja di atas, Pemerintah Daerah juga melakukan beberapa program kegiatan prioritas dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang prima. Adapun program kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Capaian Layanan Cek Kesehatan Gratis

Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan capaian layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) terbaik se-Sulawesi Tengah pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2025. Dalam capaian tersebut, Puskesmas Ampibabo menjadi puskesmas dengan jumlah layanan CKG tertinggi, yang turut berkontribusi besar terhadap prestasi Kabupaten Parigi Moutong di tingkat provinsi. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan upaya promotif dan preventif yang bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular maupun penyakit menular melalui pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Layanan ini umumnya meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan status gizi, serta skrining kesehatan lainnya sesuai kelompok usia. Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan kondisi kesehatannya sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terencana, sekaligus menurunkan angka kesakitan di Kabupaten Parigi Moutong.



Gambar 3.4
Penerimaan Penghargaan CKG Terbaik 2025

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

b. Capaian Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Kabupaten dengan ketersediaan obat dan vaksin terbaik se-Sulawesi Tengah. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kinerja yang baik dalam pengelolaan logistik farmasi serta penjaminan ketersediaan obat dan vaksin di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Capaian tersebut tidak hanya memperkuat kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kinerja retribusi pelayanan non kapitasi melalui pelayanan yang lebih optimal, terencana dan berkelanjutan.



Gambar 3.5
Penerimaan Penghargaan Ketersediaan Obat dan Vaksin Terbaik 2025

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

c. Peningkatan Kapasitas SDM

Pada Tahun 2025, Pemerintah Daerah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan gizi bencana, pelatihan keterampilan dasar kader posyandu,

pelatihan konseling menyusui, pelatihan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, pelatihan pelayanan *antenatal care* (ANC), persalinan, nifas dan *skrining hipotiroid kongenital* (SHK) bagi bidan, pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa.



Gambar 3.6
Pelatihan di Bidang Kesehatan Tahun 2025

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

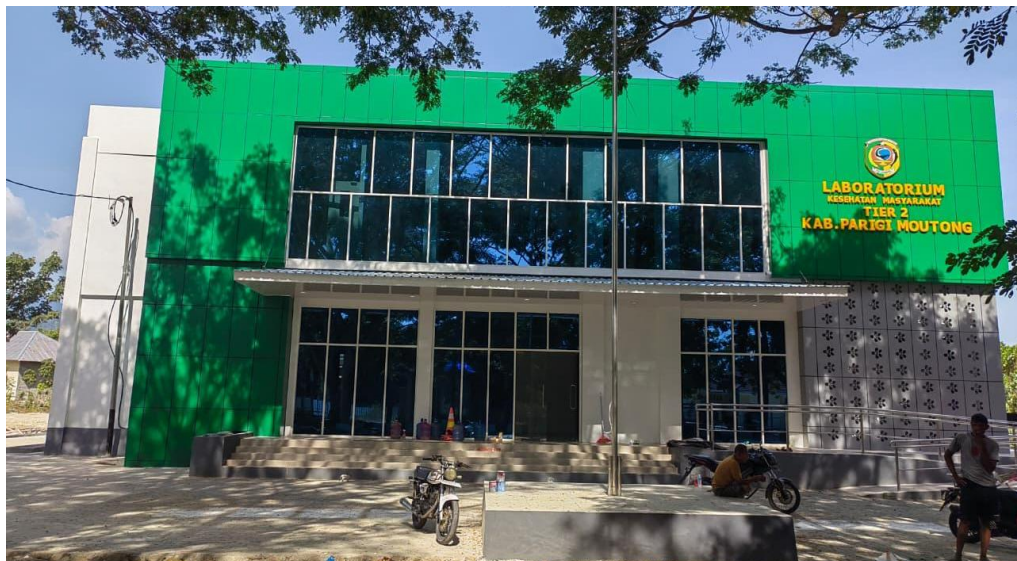
d. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pencapaian kinerja penunjang sasaran peningkatan akses fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Tahun 2025, secara nyata diwujudkan melalui pembangunan 1 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas yakni Puskesmas Torue dan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.



Gambar 3.7
Pembangunan Puskesmas Torue dan Labkesmas

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025



Gambar 3.8
Bangunan Labkesmas

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

e. Pencanaan Program Sehat Bersama Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan secara resmi meluncurkan Program Sehat Bersama sebagai bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Beberapa program di antaranya, rujukan pasien gratis yang merupakan layanan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit (FKTP ke FKTL) secara gratis bagi masyarakat, terutama bila puskesmas tidak dapat menangani karena keterbatasan fasilitas, tenaga medis, atau perlengkapan medis. Distribusi sarana mobilitas dan teknologi,

berupa penyediaan kendaraan roda dua bagi bidan desa dan juru imunisasi (Jurim), serta penyerahan 140 unit laptop untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan, pelaporan dan pemantauan secara real-time. Layanan pengantaran atau pemulangan jenazah, yang dinamakan "Layanan OTOMATIS (Oto Mayat Gratis)", yaitu pelayanan pengantaran jenazah dari fasilitas kesehatan ke rumah duka khusus bagi masyarakat tidak mampu. *Universal health coverage* (UHC), yakni sistem jaminan kesehatan daerah dengan cakupan saat ini telah mencapai 82%, menysar warga dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN).

f. Inovasi

Inovasi merupakan sebuah terobosan yang dilakukan diluar kegiatan rutin sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja bidang kesehatan Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah Daerah secara cepat membuat inovasi dengan peningkatan kerjasama bersama Universitas Tadulako dan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di bidang kesehatan.



Gambar 3.9
PKS Universitas Tadulako

Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

Pada Tahun 2025, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan program beasiswa dokter spesialis sebagai upaya strategis dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga medis spesialis di daerah. Program ini dirancang melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka, yaitu

Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, memperkuat sistem kesehatan daerah, serta menjamin ketersediaan dokter spesialis yang kompeten dan berkelanjutan di Kabupaten Parigi Moutong.



Gambar 3.10
PKS Universitas Gajah Mada
 Sumber Data : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

2.4 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Pada sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin dengan indikator angka kemiskinan, pada tahun 2025 memiliki target sebesar 14,10% dan realisasi sebesar 13,51 %. Jika capaian kinerja tersebut dipresentasikan sebesar 104% dengan kategori capaian kinerja sangat berhasil. Hal tersebut memberikan gambaran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD, namun angka tersebut masih relative tinggi sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya yang lebih serius dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong merupakan fenomena kompleks yang berakar pada tantangan geografis, ketimpangan kualitas sumber daya manusia dan inefisiensi pengelolaan aset daerah. Secara demografis, Kabupaten Parigi Moutong memiliki beban besar pada sistem pendidikan dan layanan dasar karena kelompok usia muda (0–19 tahun) yang cukup dominan dan tersebar di wilayah yang berbukit serta terpencil, yang secara langsung memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara kuantitatif

jumlah tenaga pendidik di jenjang dasar dan menengah sudah melebihi standar rasio nasional, penumpukan guru di wilayah perkotaan menyebabkan masyarakat di daerah pelosok tetap terjebak dalam kualitas layanan pendidikan yang rendah. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa masih banyak guru, terutama di tingkat SD dan PAUD swasta, yang belum memenuhi kualifikasi standar S1. Rendahnya modal manusia ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan di mana penduduk usia produktif sulit mendapatkan pekerja di luar sektor tradisional.

Dari aspek kesehatan menjadi penghalang utama dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Meskipun pemerintah telah mengupayakan jaminan kesehatan, masyarakat miskin sering kali menghadapi hambatan non-biaya yang signifikan, seperti tingginya biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta hilangnya pendapatan harian saat harus mencari pengobatan. Hal ini diperburuk dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang sering kali tidak layak, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk, yang secara langsung meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular dan masalah gizi kronis seperti *stunting* pada anak-anak. Rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit, sehingga masyarakat miskin cenderung baru mencari pertolongan medis ketika kondisi penyakit sudah memasuki tahap lanjut atau kritis.

Dari aspek pendapatan sektor pertanian dan perikanan yang merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, masih banyak didapati petani dan nelayan dalam posisi ekonomi yang rentan akibat rendahnya nilai tukar serta ketergantungan pada rantai pasok yang panjang. Rendahnya pendapatan ini sering kali berakar pada kepemilikan lahan yang sempit atau status sebagai buruh tani, di mana hasil panen sering kali tidak sebanding dengan kenaikan biaya input produksi seperti pupuk dan benih, sehingga sisa pendapatan untuk kebutuhan hidup sangat minim. Di sektor perikanan, nelayan tradisional menghadapi tantangan serupa berupa keterbatasan teknologi alat tangkap dan fluktuasi harga pasar yang sering kali dikuasai oleh tengkulak, yang

diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem yang membuat ketidakpastian pendapatan menjadi beban harian.

Dari tantangan dan permasalahan di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu:

- Melakukan pemerataan guru dengan menerapkan sistem rotasi guru atau pemberian insentif khusus (tunjangan kemahalan/daerah terpencil) agar tenaga pendidik berkualitas mau bertugas di pelosok.
- Melakukan layanan kesehatan Jemput Bola dengan memperkuat peran puskesmas keliling serta melakukan pembangunan akses air bersih dan perbaikan sanitasi di kantong-kantong kemiskinan untuk menekan angka stunting dan melakukan kampanye kesehatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran deteksi dini penyakit.
- Melakukan penguatan peran BUMDes/Koperasi untuk menyerap hasil panen dan tangkapan nelayan guna memutus ketergantungan pada tengkulak, melakukan bantuan teknologi alat tangkap bagi nelayan dan subsidi input produksi (pupuk/benih) yang tepat sasaran bagi petani berlahan sempit dan melakukan pelatihan pengolahan produk turunan (hilirisasi) agar masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil mentah yang harganya fluktuatif.

Misi 3
Mewujudkan Pertanian Modern dan Produktif

Capaian sasaran dan indikator misi “Mewujudkan Pertanian Modern dan Produktif” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Ketiga

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
3.1	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Persen	3,59	3,58	5,01	3,92
3.2	Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Berlaku Rp. (juta)	9.190.142	9.969.494	10.146.681	11.288.247
			Konstan Rp. (juta)	5.435.778	5.589.599	5.960.886	5.860.032
3.3	Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Berlaku Rp. (juta)	498.204	546.625	545.437	604.031
			Konstan	291.696	301.996	312.949	311.105

			Rp. (juta)				
3.4	Meningkatnya investasi daerah	Peringkat/realisasi investasi	Rp. (mlr)	350,021,932,173	200,291,203,576	217.663.158.191	214.951.577.483

Sumber Data : LKjIP Perangkat Daerah 2025 & Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

3.1 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Secara teoretis, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan yang sehat idealnya tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari kemampuannya untuk memutus lingkaran kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia. Indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi memiliki relevansi dengan indikator lain yang terdapat dalam misi ketiga yang mana indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi dari indikator kinerja lain. Indikator kinerja lain yang dimaksud yaitu PDRB pertanian, perikanan dan kehutanan, PDRB pengolahan dan realisasi investasi daerah. Keberhasilan/hambatan laju pertumbuhan ekonomi tergantung dari indikator lain yang telah disebutkan di atas, sehingga faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pertumbuhan ekonomi akan tertuang didalam indikator pendukung tersebut.

Target laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,01% dengan realisasi sebesar 3,92%, sehingga jika dikonversi dalam persenan capaian kinerja sebesar 78% dengan kategori berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong sebesar 3,58% terdapat kenaikan sebesar 0,34%. Hal tersebut mencerminkan adanya kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target perencanaan RPD yang telah ditetapkan, sehingga perlu langkah konkrit perbaikan yang akan tertuang dalam indikator kinerja lain/pendukung laju pertumbuhan ekonomi.

3.2 Meningkatnya Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pada sasaran meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan indikator kinerja PDRB pertanian, perikanan dan

kehutanan, pada tahun 2025 memiliki target sebesar Rp. 10.146.681 dengan realisasi sebesar Rp. 11.288.247. Jika capaian kinerja tersebut dipresentasikan sebesar 111% dengan kategori capaian kinerja sangat berhasil. Hal tersebut memberikan gambaran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD, tercapainya target kinerja tersebut tidak terlepas dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang akan dijabarkan persektor.

Realisasi PDRB sektor perikanan dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Sektor Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun Kinerja					
				2024			2025		
				Target	Realisasi	Rata-Rata (%) / Thn	Target	Realisasi	Rata-Rata (%) / Thn
1.	Meningkatnya produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	50,180	50,180	-	50,420	-	-
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25,200	29,491	117,02	25.270	30.520	20,78
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	24,980	20,004	80,08	24.150	19.995	82,83
3.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Konsumsi	Kg/ Kapita	57,45	81,75	142	57.56	81.75	142,1

Sumber Data : LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perbandingan target, realisasi, serta capaian kinerja pada beberapa indikator di sektor perikanan. Pada sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, indikator yang digunakan adalah persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dengan satuan persen. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 50,180 persen, sedangkan pada tahun 2025

meningkat menjadi 50,420 persen. Untuk realisasi tahun 2025 masih dalam proses validasi dan perhitungan.

Selanjutnya pada sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan, indikator produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 25.200 ton dengan realisasi mencapai 29.491 ton, sehingga capaian kinerja sebesar 117,02 persen. Pada tahun 2025 target produksi perikanan tangkap meningkat menjadi 25.270 ton dengan realisasi sebesar 30.520 ton, sehingga capaian kinerja mencapai 120,78 persen. Untuk indikator produksi perikanan budidaya, pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 24.930 ton dengan realisasi sebesar 20.004 ton, sehingga capaian kinerja sebesar 80,08 persen. Pada tahun 2025 target produksi perikanan budidaya sebesar 24.150 ton, dengan realisasi sebesar 19.995 ton atau mencapai 82,83 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu, pada sasaran strategis meningkatnya angka konsumsi ikan, indikator yang digunakan adalah tingkat konsumsi ikan masyarakat dengan satuan kilogram per kapita. Pada tahun 2024 target konsumsi ikan sebesar 57,45 kg/kapita dengan realisasi mencapai 81,75 kg/kapita, sehingga capaian kinerja sebesar 142 persen. Pada tahun 2025 target meningkat menjadi 57,56 kg/kapita dengan realisasi yang sama yaitu 81,75 kg/kapita, sehingga capaian kinerja mencapai 142,1 persen.

Pada sektor pertanian, capaian kontribusi terhadap PDRB dapat dilihat dari capaian kinerja sektor pertanian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sektor Pertanian

No	Komoditi	Target	Realisasi		
		2025	2023	2024	2025
A.	Tanaman Pangan (Ton/Ha)	342.281,2	332.359,8	338.891,9	386.912,5
1.	Produksi Padi Sawah	289.645,8	295.378	286.778	335.440
2.	Produksi Jagung	45.697,5	30.337	45.245	42.691
3.	Produksi Kedelai	511,4	49	506	15,8
4.	Produksi Kacang Hijau	58,3	89,5	57,7	83,7
5.	Produksi Kacang Tanah	366,1	352,6	362,5	363,9
6.	Produksi Ubi Kayu	4.153,4	4408	4.112,3	4484,7
7.	Produksi Ubi Jalar	1.848,7	1745,7	1.830,4	3833,4

B.	Tanaman Hortikultura (Ton/Ha)	28.362,6	46.867	28.081	32.062
1.	Produksi Bawang Merah	861,6	1.108	853	452
2.	Produksi Cabai Rawit	3.882	5.824	3.843	5.100
3.	Produksi Cabai Besar	494,9	639	490	814
4.	Produksi Durian	23.124	39.296	22.895	25.696
C.	Tanaman Perkebunan (Ton/Ha)	67.653,7	68.649,1	67.016,7	68.194,0
1.	Produksi Kelapa Dalam	35.887,3	35.891,5	35.532,6	35.951,6
2.	Produksi Cengkeh	1.942,2	1.904,3	1.923,3	1.912,8
3.	Produksi Kakao	28.686,0	28.689,4	28.402,5	29.052,5
4.	Produksi Kelapa Hibrida	924,2	1.829,0	915,3	922,5
5.	Produksi Jambu Mente	165,6	238,3	164,1	231,3
6.	Produksi Pala	24,2	72,4	54,6	86,5
7.	Produksi Lada	24,2	24,1	24,3	36,8

Sumber Data : LKjIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk komoditi tanaman pangan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 342.281,2 (Ton/Ha) dengan realisasi sebesar 386.912,5 (Ton/Ha) serta mengalami kenaikan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 332.359,8 (Ton/Ha) dan 338.891,9 (Ton/Ha). Komoditi tanaman hortikultura pada tahun 2025 memiliki target sebesar 28.362,6 (Ton/Ha) dengan realisasi sebesar 32.062 (Ton/Ha) serta mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan realisasi sebesar 28.081 (Ton/Ha), namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian komoditi tanaman hortikultura mengalami penurunan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 46.867 (Ton/Ha). Untuk komoditi tanaman perkebunan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 67.653,7 (Ton/Ha) dengan realisasi sebesar 68.194 (Ton/Ha) serta mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan realisasi sebesar 67.016,7 (Ton/Ha), namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian komoditi tanaman perkebunan mengalami penurunan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 68.649,1 (Ton/Ha).

Berdasarkan capaian kinerja di atas, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja dalam meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan kehutanan pada indikator, adapun permasalahan/hambatan sebagai berikut:

- a. Kurangnya prasarana pembongkaran ikan (tambahan perahu) sehingga mempengaruhi akses untuk memperoleh data yang akurat, dimana sebagian besar nelayan masih memakai alat tangkap tradisional sehingga hasil belum maksimal.
- b. Aktivitas pertambangan emasi di beberapa wilayah di Kabupaten Parigi Moutong telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir seperti padang lamun dan terumbu karang sehingga merusak habitat ikan, selain itu pertambangan emas juga merusak kualitas air yang berdampak pada kesehatan ikan dan produksi perikanan
- c. Belum maksimalnya Infrastruktur seperti jalan, irigasi dan fasilitas penyimpanan yang belum memadai dapat menghambat distribusi dan hasil produksi pertanian. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pada sektor pertanian.
- d. Perubahan iklim yang sangat cepat mempengaruhi pola tanam dan hasil pertanian, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil pertanian yang tidak maksimal.

Dari tantangan dan permasalahan di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu:

- a. Melakukan penambahan produksi perikanan tangkap berupa armada, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh nelayan dikarenakan kondisi dilapangan dalam 1 armada dipakai oleh 2-10 orang secara bergantian.
- b. Melakukan pengembangan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, melakukan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan. Selain itu Pemerintah Daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan yang merusak lingkungan.
- c. Melakukan pembangunan berbasis prioritas sehingga fokus pada pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dengan prioritas pada area yang paling membutuhkan perbaikan, selain itu Pemerintah Daerah akan fokus mencari sumber anggaran yang berasal dari APBN untuk melakukan pembangunan infrastruktur pertanian.

- d. Melakukan penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan yang adaptif serta melakukan pemanfaatan teknologi seperti pompa air.

3.3 Meningkatnya Pengolahan Hasil Komoditi Unggulan

Pada sasaran meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan dengan indikator kinerja PDRB pengolahan. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 498.200 sedangkan target tahun 2024 menurut RPD sebesar Rp. 520.256, hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target pada sasaran kinerja. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 482.710, pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2025 memiliki target sebesar Rp. 545.437 dengan realisasi sebesar Rp. 604.031, hal tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah dalam mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 111% dengan capaian kinerja sangat berhasil. Dalam mencapai target kinerja yang tertuang dalam RPD, tentunya perlu adanya langkah-langkah yang konkrit Pemerintah Daerah selain itu peran Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam mewujudkan sasaran kinerja Pemerintah Daerah.

3.4 Meningkatnya Investasi Daerah

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut. Seperti pemerintah, badan usaha negeri, dan perorangan (Warga Negara Indonesia), yang melakukan penanaman modal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri mampu menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang, dan memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

Penanaman modal baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat/meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMDN dan Jumlah Investor di Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Realisasi Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten Parigi Moutong

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi	Rp. (mlr)	350,021,932,173	200,291,203,576	217.663.158.191	214.951.577.483
			Jumlah Presentase Peningkatan Investasi PMA Dan PMDN	183	249	-	479

Sumber Data : LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 350,021,932,173, mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan realisasi investasi sebesar Rp. 200,291,203,576 dan mengalami kenaikan pada tahun 2025 dengan realisasi investasi sebesar Rp. 214.951.577.483. Untuk tahun 2025 memiliki target sebesar 217.663.158.191, realisasi investasi tahun 2025 belum mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 99% dengan kategori berhasil.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Investasi menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan pembangunan KEK dan diharapkan dapat terus meningkat. Terkait dengan perkembangan KEK ini mendorong pencapaian investasi yang baik, telah mampu membuka lapangan kerja baru, dan capaian tersebut didorong oleh beberapa KEK berbasis industri. Selain itu, adanya sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang menjadi platform satu pintu bagi kepengurusan izin usaha, menjadi solusi sektoral yang dulu seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha mengurus izin usahanya. Serta dengan dukungan berbagai upaya temu usaha dalam rangka sinergitas antara pemerintah Kabupaten Parigi

Moutong dengan pelaku usaha ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah melakukan promosi investasi melalui keikutsertaan pada Pameran Festival Teluk Tomini 2025 di Kabupaten Parigi Moutong dan Festival Danau Poso 2025 di Kabupaten Poso.

Misi 4

Mewujudkan Tata Ruang Yang Teratur, Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Terpelihara, Asri, Aman dan Tertib

Capaian sasaran dan indikator misi “Mewujudkan Tata Ruang Yang Teratur, Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Terpelihara, Asri, Aman dan Tertib” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Sasarana dan Indikator Kinerja Pendukung Misi Keempat

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	74,84	72,81	79,65	84,79
4.2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	52,86	50,00	65,60	78,84
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	96,99	94,61	94,86	90
		Indeks tutupan lahan	Poin	71,63	71,68	78,79	85,36
4.3	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	97,72	93,53	108,39	121,08
4.4	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	85,87	80	81	81
4.5	Meningkatkan ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/Kawasan perkotaan	Persen	41,49	41,49	19	26

Sumber Data : LKjIP Perangkat Daerah & Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2026

4.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang digunakan sebagai indikator kinerja utama dalam menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengukuran ini sangat krusial karena kondisi lingkungan yang tidak layak, seperti

kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk, secara langsung meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular dan masalah gizi kronis seperti *stunting*. Secara ilmiah, IKLH memberikan gambaran apakah suatu pembangunan telah berjalan selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan atau justru menimbulkan degradasi yang memperburuk mata pencaharian masyarakat lokal, seperti nelayan tradisional yang sangat bergantung pada kestabilan cuaca dan ekosistem laut.

Indikator kinerja dalam mengukur IKLH umumnya terdiri dari tiga indikator komponen dasar yang mencakup berbagai aspek vital kehidupan. Pertama adalah Indeks Kualitas Air (IKA), yang memantau tingkat pencemaran air untuk memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi konsumsi masyarakat. Kedua adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), yang mengukur konsentrasi polutan di atmosfer yang dapat memengaruhi kesehatan pernapasan penduduk. Ketiga adalah Indeks Tutupan Lahan, yang menilai sejauh mana kelestarian hutan dan lahan terjaga dari inefisiensi pengelolaan aset daerah. Ketiga indikator ini sering kali saling berkaitan. Keberhasilan/hambatan IKLH tergantung dari indikator lain yang telah disebutkan di atas, sehingga faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan kualitas lingkungan hidup akan tertuang didalam indikator pendukung tersebut.

Target IKLH pada tahun 2025 sebesar 79,65 poin dengan realisasi sebesar 84,79 poin, jika dikonversi dalam persentase capaian kinerja sebesar 106% dengan kategori capaian sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi IKLH sebesar 72,81 poin, terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 6,84 poin. Hal tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Parigi Moutong.

4.2 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Pada sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan terdapat 3 indikator kinerja yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks tutupan lahan. Data Indeks Kualitas Air diperoleh

dari olahan data terhadap data hasil pemantauan pengujian kualitas air sungai yang dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong ditambah dengan data dari pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Adapaun sungai yang dipantau adalah sungai tinombo dan sungai sausu. Pengolahan data yang dilakukan adalah berdasarkan indeks pencemaran melalui excel yang telah dikonfersi secara langsung. Berdasarkan hasil data yang telah diolah berdasarkan aplikasi dalam IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka diperoleh nilai IKA Kabupaten sebesar 78,84 poin, capaian tersebut berhasil melampaui target kinerja 2025 sebesar 65,60 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan kategori capaian sangat berhasil.

Berdasarkan olahan data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui situs online pelaporan IKLH maka diperoleh hasil bahwa Indeks Kualitas Udara Kabupaten Parigi Moutong sebesar 90.00 poin dan masuk dalam kategori baik, hal tersebut menggambarkan belum tercapainya target kinerja tahun 2025 yang mana target kinerja sebesar 94,86 poin, jika dilakukan persentase capaian kinerja 2025 sebesar 95% dengan kategori capaian baik. Berdasarkan data capaian kinerja pada tahun 2024, IKU tahun 2024 sebesar 94,61 poin artinya pada tahun 2025 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 4,61 poin.

Data ini diperoleh dari pemantauan kualitas udara bantuan dari KLH khususnya Dirjen Pengendalian Pencemaran Udara dengan titik pemantauan yang dilakukan adalah lokasi perkantoran (dengan lokasi Kantor Bupati Parigi Moutong), lokasi perumahan (dengan lokasi perumahan banua indah kampal), lokasi industri (dengan lokasi industri menengah tahu tempe bambalemo) dan lokasi transportasi (dengan lokasi KPH binangga pangi).

Penentuan nilai indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2025 berdasarkan olahan data yang diperoleh dalam pelaporan online IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa nilai indeks tutupan lahan Kabuapten Parigi Muotong sebesar 85,36 poin, pada tahun

2025 Pemerintah Daerah menargetkan capaian indeks kualitas tutupan lahan sebesar 78,79 poin. Capaian tersebut jika dipersentasikan kedalam capaian kinerja sebesar 108% dengan kategori capaian kinerja sangat berhasil. Capaian nilai indeks kualitas tutupan lahan berdasarkan data yang diinput dalam aplikasi IKLH dan juga berdasarkan citra satelit yang diperoleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Upaya perbaikan lingkungan hidup dilakukan dengan penertiban persetujuan lingkungan hidup di Kabupaten Parigi Moutong. Persetujuan Lingkungan merupakan keputusan administratif yang berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan ini menjadi salah satu persyaratan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Persetujuan lingkungan diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan yang disusun oleh pemrakarsa, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Penilaian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan telah memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memiliki upaya pengendalian dampak lingkungan yang memadai.

Pengajuan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Amdal.net, yang merupakan aplikasi resmi pemerintah untuk pelayanan dokumen lingkungan hidup. Melalui sistem ini, pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL secara elektronik untuk dilakukan verifikasi administrasi dan penilaian teknis oleh instansi berwenang. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, Persetujuan Lingkungan Hidup diterbitkan melalui sistem tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Penerbitan Persetujuan Lingkungan bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mencegah dan mengendalikan potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan melalui sistem Amdal.net, Pemerintah Daerah telah menerbitkan persetujuan lingkungan hidup bagi badan usaha dan/atau kegiatan pada periode tahun 2025. Persetujuan tersebut diberikan kepada pemrakarsa yang telah memenuhi ketentuan dokumen lingkungan, baik melalui mekanisme penerbitan otomatis maupun melalui proses penilaian teknis sesuai peraturan yang berlaku. Adapun data hasil penerbitan persetujuan lingkungan hidup disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Penertiban Persetujuan Lingkungan Hidup 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Satuan
1.	Jumlah Persetujuan Lingkungan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL/DELH	0	Dokumen
2.	Jumlah Persetujuan Lingkungan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL/DPLH	1	Dokumen
3.	Jumlah Persetujuan Lingkungan yang wajib dilengkapi dokumen SPPL	71	Dokumen
4.	Jumlah Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	1	Dokumen
5.	Jumlah Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi (BMU)	0	Dokumen
6.	Jumlah Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	1	Dokumen
Total Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis yang diterbitkan		74	Dokumen

Sumber Data : LKjIP Dinas Lingkungan Hidup 2025

Selain itu dalam upaya perbaikan lingkungan, Pemerintah Daerah juga melakukan program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan dan izin perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan badan usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan

(RPL), serta ketentuan izin lingkungan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung tercapainya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sejak tahun 2025, Bidang Penataan dan Petaan PPLH secara konsisten telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha dan/atau kegiatan. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Hasil Pembinaan/Pengawasan Ketaatan Badan Usaha/Kegiatan

No	Nama Badan Usaha/Kegiatan	Lokasi	Jenis Usaha/Kegiatan	Status Ketaatan	Tindak Lanjut
1.	PT. Graha Tambak Pinotu	Jln. Trans Sulawesi Pinotu	budidaya tambak udang	tidak taat	surat teguran
2.	PT. Silkar National	Dusunan Kecamatan Tinombo	tambang galian batu dan pasir dan amp	tidak taat	-
3.	RSUD Raja Tombolotutu	Jln. Trans Sulawesi Desa Tinombo	pelayanan fasilitas kesehatan tipe-C	tidak taat	-
4.	PT. Karivan Muda Pratama	Desa Tanalanto Kecamatan Parigi Selatan	tambang galian batu dan pasir dan AMP	tidak taat	-
5.	RSUD Buluyu'e Napoae Moutong	Jln. Trans Sulawesi Desa Tinombo	pelayanan fasilitas kesehatan tipe-C	tidak taat	-

Sumber Data : LKjIP Dinas Lingkungan Hidup 2025

Berdasarkan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengalami beberapa kendala/permasalahan di bidang lingkungan hidup, adapun kendala/permasalahan sebagai berikut:

- Beberapa dokumen teknis seperti SKKL dan Pertek Emisi belum diterbitkan karena proses verifikasi teknis yang kompleks.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan penilaian dan verifikasi dokumen secara cepat.

- c. Koordinasi lintas instansi yang diperlukan untuk persetujuan dokumen teknis tertentu masih memerlukan waktu.
- d. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan.
- e. Sumber daya manusia dan anggaran pengawasan yang terbatas sehingga pengawasan rutin belum maksimal.
- f. Koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat untuk menindaklanjuti ketidaktaatan secara konsisten.

Dari kendala/permasalahan di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu:

- a. Mempercepat penyelesaian penerbitan dokumen persetujuan teknis dan SKKL yang belum diterbitkan.
- b. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan verifikasi teknis dokumen lingkungan.
- c. Memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat proses persetujuan dokumen teknis.
- d. Memanfaatkan sistem Amdal.net secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan perizinan lingkungan.
- e. Melakukan sosialisasi kepada pemrakarsa mengenai kelengkapan dokumen untuk mempercepat proses penerbitan persetujuan lingkungan hidup.
- f. Memperluas pengawasan dan pembinaan terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat, termasuk pemberian surat teguran dan tindakan administratif lain sesuai ketentuan.
- g. Menyusun program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban perizinan dan pengelolaan lingkungan.
- h. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah terkait untuk memastikan tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan secara konsisten.
- i. Menetapkan jadwal pengawasan berkala agar kepatuhan badan usaha/kegiatan dapat dipantau secara berkelanjutan.

- j. Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi capaian ketaatan secara digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

4.3 Menurunnya Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah perangkat pengukur yang digunakan untuk menentukan tingkat potensi kerugian yang timbul akibat bencana di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Secara ilmiah, risiko bencana tidak hanya dilihat dari seberapa besar kekuatan alam yang mengancam, tetapi juga dari kondisi kerentanan masyarakat dan kemampuan daerah tersebut dalam merespons ancaman. Hal ini menjadi sangat relevan bagi wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki daerah berbukit dan terpencil, di mana aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan dasar sering kali terhambat. Penilaian risiko ini menjadi basis data penting untuk menentukan apakah sebuah daerah masuk dalam kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi, guna meminimalisir dampak buruk terhadap modal manusia dan stabilitas ekonomi daerah.

Indikator dalam mengukur Indeks Risiko Bencana terdiri dari tiga komponen utama yaitu Ancaman (*Hazard*), Kerentanan (*Vulnerability*), dan Kapasitas (*Capacity*). Ancaman mengukur frekuensi dan kekuatan fenomena fisik (seperti gempa atau cuaca ekstrem) yang berpotensi merusak. Kerentanan mencakup aspek fisik, sosial dan ekonomi, termasuk rendahnya kualitas lingkungan, sanitasi buruk, serta minimnya pemahaman kesehatan dan pencegahan penyakit di masyarakat miskin. Kapasitas mengukur kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, seperti ketersediaan jaminan kesehatan dan pemerataan tenaga profesional (pendidik atau kesehatan) hingga ke daerah pelosok untuk mencegah memburuknya kondisi masyarakat saat terjadi krisis.

Pada tahun 2025, target IRB Kabupaten Parigi Moutong sebesar 108,39 poin dengan realisasi kinerja sebesar 121,08 poin. Rentang nilai IRB terbagi dalam 3 kategori yaitu <13,00 (kategori risiko rendah), 13,00-144,00 (kategori risiko sedang) dan >144,00 (kategori risiko tinggi). Berdasarkan

kategori di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja IRB belum memenuhi target kinerja dimana persentase capaian kinerja sebesar 88% dengan kategori kinerja berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi 2024 sebesar 93,53 poin terdapat penurunan sebesar 27,55 poin.

Berdasarkan capaian indikator kinerja IRB yang belum memenuhi target dengan capaian yang semakin menurun tentunya ada beberapa permasalahan yang Pemerintah Daerah alami dalam pelaksanaan hal tersebut, adapun permasalahan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Maraknya pelaksanaan tambang emas ilegal yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Parigi Moutong memberikan dampak yang sangat serius bagi lingkungan, mulai dari penggundulan hutan di hulu sungai, pencemaran air sungai yang merupakan sumber utama pertanian/kehidupan masyarakat, rusaknya ekosistem terumbu karang di laut.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan bencana daerah, dapat dilihat pada kebakaran hutan dan lahan yang baru ini terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Masyarakat melakukan pembakaran lahan perkebunan yang menyebar ke lahan pertanian masyarakat.
- c. Perubahan iklim yang sangat ekstrim menyebabkan perubahan cuaca yang begitu cepat sehingga menyebabkan banjir, kemarau berkepanjangan (el nino) yang menyebabkan permasalahan pada sektor pertanian dan perikanan.

Dari kendala/permasalahan di atas, maka pada tahun 2026 direncanakan akan dilakukan beberapa strategi perbaikan, yaitu:

- a. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan tambang ilegal, selain itu Pemerintah Daerah berupaya untuk menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat dengan pelatihan kerja yang konsisten.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap mitigasi bencana, sehingga dapat meminimalisir bencana yang diakibatkan oleh manusia.

- c. Melakukan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul penahan banjir, melakukan penanaman pohon pada hutan gundul dan mangrove pada daerah pantai.

4.4 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya

Pada sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dengan indikator kinerja ketaatan terhadap RTRW. Pada tahun 2025 memiliki target sebesar 81% dan realisasi sebesar 81%, jika capaian kinerja tersebut dipresentasikan maka capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian kinerja sangat berhasil. Pada tahun 2024 realisasi ketaatan terhadap RTRW sebesar 80%, artinya pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1%.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Parigi Moutong, khususnya dalam perubahan RTRW 2020–2045. Hal ini mencakup pengelolaan ruang untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara berwawasan lingkungan, mencegah degradasi lingkungan, dan menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta kelestarian lingkungan hidup. KLHS bertujuan menjadi dasar pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan tata ruang.

Saat ini, dokumen KLHS berada dalam tahap penyusunan di Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, dengan capaian sekitar 50%. Identifikasi isu lingkungan strategis telah dilakukan, termasuk degradasi lahan, pencemaran lingkungan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rekomendasi kebijakan dan langkah mitigasi masih dalam proses finalisasi, sementara konsultasi publik direncanakan untuk tahap berikutnya. Penyelesaian dokumen sampai akhir tahun 2025 belum sepenuhnya selesai dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh tim ahli dalam penyusunan dokumen terutama, informasi dan data pendukung perubahan RTRW, belum diajukan pengajuan pra Validasi dan Validasi Dokumen KLHS Perubahan RTRW tersebut ke Gubernur Sulawesi Tengah.

KLHS merupakan instrumen strategis yang berperan penting dalam menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam perubahan RTRW, khususnya terkait pengembangan WPR. Realisasi 50% menunjukkan kemajuan, tetapi proses penyusunan dokumen masih berjalan, sehingga rekomendasi kebijakan dan langkah mitigasi belum sepenuhnya siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses yang berjalan saat ini sudah mencakup identifikasi isu strategis dan penilaian dampak, namun keterlambatan penyusunan dokumen akhir dapat memengaruhi implementasi perubahan RTRW tepat waktu.

Faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi RTRW yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan KLHS.
- b. Koordinasi lintas sektor yang kompleks dan memerlukan sinkronisasi kebijakan antarperangkat daerah.
- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat yang memerlukan waktu dan proses konsultasi yang sistematis.
- d. Kompleksitas integrasi isu lingkungan dengan rencana tata ruang yang baru.

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi, Pemerintah Daerah akan melakukan tindak lanjut berupa:

- a. Mempercepat proses penyusunan dokumen KLHS dengan alokasi sumber daya tambahan dan pendampingan teknis.
- b. Memastikan keterlibatan aktif perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan tahapan identifikasi isu strategis dan rekomendasi kebijakan.
- c. Melaksanakan konsultasi publik/FGD untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga dokumen KLHS lebih komprehensif dan partisipatif.
- d. Menyusun timeline finalisasi dokumen yang jelas agar KLHS dapat digunakan tepat waktu sebagai dasar perubahan RTRW.
- e. Memastikan integrasi hasil KLHS ke dalam rancangan perubahan RTRW untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan tetap terjaga.

4.5 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau

Pada sasaran meningkatnya ruang terbuka hijau dengan indikator kinerja luasan RTH publik. Pada tahun 2025 memiliki target sebesar 19% dan realisasi sebesar 26%, jika capaian kinerja tersebut dipresentasikan maka capaian kinerja sebesar 137% dengan kategori capaian kinerja sangat berhasil. Pada tahun 2024 realisasi luasan RTH publik sebesar 41,49%, artinya pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 15,49%.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan subkategori dari ruang terbuka yang fokus pada pengembangan dan pelestarian area hijau seperti taman, hutan kota, sabuk hijau, dan ruang publik lainnya yang didominasi oleh vegetasi. Tujuan utama dari RTH adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang rekreasi yang sehat bagi masyarakat, meningkatkan estetika kota, serta berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan pengendalian iklim mikro kota. RTH menjadi sangat kritis di tengah perkembangan yang cepat, di mana tekanan terhadap penggunaan lahan menimbulkan risiko terhadap pemangkasan area hijau. Dengan demikian, keberadaan dan pengelolaan RTH harus secara strategis direncanakan dan dikelola untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, sehingga dapat tercipta kota yang layak huni dan berkelanjutan untuk masa depan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH adalah bagian penting dari infrastruktur hijau yang menyediakan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi penduduknya. Selain itu, RTH di memiliki fungsi sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan, sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahan lingkungan, serta sarana rekreasi. Ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1998.

Meskipun keberadaan RTH sangat penting, Kabupaten Parigi Moutong menghadapi beberapa masalah dalam pemeliharaan dan

pengembangan area hijau ini. Banyak area ruang terbuka hijau yang tidak terawat dengan baik, mengalami penurunan kualitas estetika dan fungsional. Hal ini sering kali dikaitkan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun pembiayaan dari pemerintah setempat. Faktor lainnya adalah minimnya partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dalam proses pemeliharaan, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau. Degradasi RTH yang ada menyebabkan banyak ruang hijau yang sudah ada mengalami degradasi karena dipengaruhi oleh faktor manusia dan kurangnya pemeliharaan dan proteksi. Selain itu keterlibatan masyarakat masih rendah dalam partisipasi dan kesadaran dalam usaha penciptaan dan pemeliharaan RTH.

Meningkatkan RTH di Kabupaten Parigi Moutong merupakan inisiatif yang penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan urban, kesehatan masyarakat dan kualitas hidup penduduk. Berikut ini adalah upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan RTH:

- a. Melakukan pengembangan taman kota yang menjadi kunci dalam meningkatkan RTH. Taman kota tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang menyediakan oksigen segar untuk penduduknya, tapi juga sebagai tempat berinteraksi sosial, berolahraga, dan bersantai dari kesibukan sehari-hari.
- b. Melakukan konservasi area hijau yang memiliki peran sangat penting dalam upaya melestarikan ekosistem alami dan meningkatkan RTH. Dengan mengidentifikasi dan melindungi area hijau yang ada, Pemerintah dapat memastikan bahwa ruang hijau tersebut tidak akan berubah fungsi menjadi areal komersial atau permukiman.
- c. Penerapan zonasi hijau merupakan strategi peningkatan RTH dengan mengalokasikan lahan tertentu sebagai area yang harus dijaga kehijauannya. Peraturan ini harus ditegakkan untuk mencegah alih fungsi lahan hijau menjadi lahan komersial atau industri.

3.3 Capaian Indikator Program dan Kegiatan Pemerintah

Faktor lainnya yang berpengaruh dalam pengukuran capaian kinerja berupa penyajian data kinerja yang masih sulit untuk diperoleh dari PD terkait. Hal ini mempengaruhi dalam menilai ada tidaknya peningkatan kinerja. Dengan demikian penyajian terhadap capaian kinerja yang dapat dilaporkan baru sampai pada pencapaian output kegiatan baik berupa barang maupun jasa. Sehingga penyajian capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis belum dapat dilaporkan secara lengkap, Adapun rincian dari daftar pencapaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan prioritas pembangunan diatas, maka kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan dirumuskan ke dalam tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta program dan kegiatan. Sampai dengan akhir triwulan IV, seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil evaluasi berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah.

3.4 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

Pencapaian realisasi anggaran Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan kebijakan daerah. Hal tersebut dikarenakan memiliki peran penting dalam rencana pembangunan dan keberhasilan rencana program kegiatan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, tercapainya realisasi anggaran pemerintah yang tepat waktu dan sesuai target adalah kunci untuk menjaga kelancaran pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun rincian dari daftar Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Parigi Moutong disusun berdasarkan RPD Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Parigi Moutong telah berupaya memaksimalkan sasaran berdasarkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 terhadap 16 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja. Apabila diuraikan capaian kinerja tiap indikator kinerja, dihasilkan sebanyak 13 indikator kinerja dengan capaian Sangat Berhasil dan sebanyak 9 indikator kinerja dengan capaian Berhasil. Capaian tersebut merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025. Tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan perbaikan dan upaya peningkatan kinerja.

4.2 Tindak Lanjut

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan perencanaan kinerja pada tingkatan terbesar hingga terkecil.
2. Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
3. Menyelaraskan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPJMD 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja dengan DPA yang sudah ditetapkan.
4. Melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah.
5. Melaksanakan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil.
6. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya terutama sektor pariwisata dan perdagangan.

PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2025

No	Sasaran Dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Anggaran	Realisasi	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	Perangkat daerah Penanggung Jawab
			Rp.	Rp.	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6		7
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	111.729.081.829	29.777.016.367	88,89	26,65	DISDIK
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi SPM	3.083.713.400	2.917.381.011	100,00	94,61	DISDIK
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	342.484.066.497	205.954.812.484	100,00	60,14	DISDIK
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya Lokal	707.354.900	689.116.700	100,00	97,42	DISDIK
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Daerah Yang Dikembangkan	851.913.200	822.439.720	100,00	96,54	DISDIK
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Cakupan Adat Budaya Yang Dilestarikan	63.500.000	63.500.000	100,00	100,00	DISDIK
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Di Lestarkan	180.062.900	163.526.700	100,00	90,82	DISDIK
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	137.271.284.123	123.840.688.307	4,22	90,22	DINKES
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Tingkat Kabupaten	5.186.288.901	5.045.357.185	60,00	97,28	DINKES
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Penerbitan Rekomendasi Sarana Farmasi, Alat Kesehatan, P-IRT Dan Sertifikat Uji Sesuai Standar	313.305.000	311.493.348	0,00	99,42	DINKES
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	257.228.950	178.536.510	0,00	69,41	DINKES
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	77.536.551.105	73.006.223.972	16,39	94,16	DINKES
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian 6 Indikator Pelayanan Rumah Sakit	14.900.000.000	13.815.640.602	100,00	92,72	BLUD-RSUD ANUNTALOKO

2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai Klasifikasi Rumah Sakit	-	-				BLUD-RSUD ANUNTALOKO
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	114.391.083.612	111.572.522.828	100,00	97,54		BLUD-RSUD ANUNTALOKO
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	12.561.929.608	10.212.068.361	100,00	81,29		RSUD RJTT
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Tingkat Kabupaten	-	-				RSUD RJTT
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	28.174.357.297	25.461.943.485	75,00	90,37		RSUD RJTT
6	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	7.309.826.931	4.507.161.327	66,67	61,66		RSUD BULUYE NAPOA'E
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Tingkat Kabupaten	2.040.000	500.000	100,00	24,51		RSUD BULUYE NAPOA'E
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	4.239.740.326	3.417.356.185	98,57	80,60		RSUD BULUYE NAPOA'E
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	2.031.529.613	2.019.116.195	77,50	99,39		DINAS PUPRP
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	1.803.589.500	1.627.240.748	100,00	90,22		DINAS PUPRP
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi	14.050.598.500	7.233.224.416	66,67	51,48		DINAS PUPRP
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase Perkotaan Yang Dibangun	771.760.000	769.039.000	100,00	99,65		DINAS PUPRP
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan	300.831.400	290.984.182	100,00	96,73		DINAS PUPRP
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun	711.380.000	710.236.700	100,00	99,84		DINAS PUPRP
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	8.636.188.107	8.220.214.659	98,87	95,18		DINAS PUPRP
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-				DINAS PUPRP
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	1.336.833.998	1.319.220.746	100,00	98,68		DINAS PUPRP
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	14.671.168.970	13.884.097.289	99,43	94,64		DINAS PUPRP
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Bidang Tanah Yang Di Ganti Rugi	77.051.000	76.884.900	100,00	99,78		DINAS PUPRP

9	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pemukiman Layak Huni	657.333.900	656.934.386	62,50	99,94	DINAS PKP
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1.778.623.600	1.770.148.698	1,35	99,52	DINAS PKP
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Psu	2.024.782.000	2.018.884.262	73,75	99,71	DINAS PKP
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6.393.900	6.271.900	100,00	98,09	DINAS PKP
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.717.291.860	3.451.319.946	97,06	92,85	DINAS PKP
10	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kenaikan Kapasitas Penanggulangan Bencana Kabupaten	1.304.084.400	1.261.845.152	100,00	96,76	BPBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.601.330.238	3.385.528.478	100,00	94,01	BPBD
11	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran K3	756.351.500	738.223.570	100,00	97,60	SATPOL PP & DAMKAR
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	248.606.680	243.115.734	100,00	97,79	SATPOL PP & DAMKAR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	9.960.888.361	9.520.716.656	95,65	95,58	SATPOL PP & DAMKAR
12	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Masyarakat KAT Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	1.146.919.840	1.145.884.164	100,00	99,91	DINAS SOSIAL
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Diberdayakan	1.127.574.971	1.119.975.683	87,50	99,33	DINAS SOSIAL
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	1.741.848.375	1.734.137.250	100,00	99,56	DINAS SOSIAL
4	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam Dan Sosial	287.081.700	284.704.200	97,33	99,17	DINAS SOSIAL
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.865.163.604	3.688.128.424	94,74	95,42	DINAS SOSIAL
13	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kopetensi	426.047.050	406.059.288	100,00	95,31	NAKERTRANS
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Tedaftar Yang Ditempatkan	166.158.166	126.090.195	100,00	75,89	NAKERTRANS

3	Program Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian Kasus	41.065.711	21.606.106	75,00	52,61	NAKERTRANS
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.233.756.903	2.911.881.471	92,47	90,05	NAKERTRANS
14	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi						
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	5.468.033	5.214.000	0,00	95,35	NAKERTRANS
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.322.800	2.167.900	100,00	93,33	NAKERTRANS
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terbinanya Warga Trans	225.497.505	224.649.343	100,00	99,62	NAKERTRANS
15	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.921.600	94.834.600	100,00	99,91	DP3A2KB
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	111.950.500	105.260.000	100,00	94,02	DP3A2KB
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender	186.567.700	186.088.850	100,00	99,74	DP3A2KB
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	-	-			DP3A2KB
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.574.000	95.241.900	100,00	99,65	DP3A2KB
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan Anak Dan Perempuan Yang Terlayani	-	-			DP3A2KB
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	5.840.316.704	5.532.056.913	100,00	94,72	DP3A2KB
16	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1	Program Pengendalian Penduduk		302.863.500	299.452.290	100,00	98,87	DP3A2KB
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		7.656.737.684	7.770.822.223	100,00	101,49	DP3A2KB
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		4.114.008.950	4.100.896.750	100,00	99,68	DP3A2KB
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	902.558.000	902.080.261	100,00	99,95	DINAS KETAPANG
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	1.093.519.200	1.092.459.438	100,00	99,90	DINAS KETAPANG
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	441.664.000	441.616.151	100,00	99,99	DINAS KETAPANG
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Dalam Status Aman Pangan	40.535.600	40.442.200	100,00	99,77	DINAS KETAPANG
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	2.805.216.433	2.453.507.200	100,00	87,46	DINAS KETAPANG
18	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	43.666.000	43.463.000	100,00	99,54	DLH
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	399.040.896	394.495.419	100,00	98,86	DLH
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan	537.978.710	532.200.010	101,08	98,93	DLH

4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Badan Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Taat	16.931.300	16.833.300	50,00	99,42	DLH
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen Permohonan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPLH	33.117.800	33.001.400	77,27	99,65	DLH
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah Dokumen Mha	-	-			DLH
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Dokumen Lembaga/Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	-	-			DLH
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan Lingkungan Hidup	-	-			DLH
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dokumen Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani Dan terselesaikan	75.274.000	75.177.272	100,00	99,87	DLH
10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	2.206.203.518	2.150.134.815	80,49	97,46	DLH
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	4.714.623.711	4.446.175.019	94,93	94,31	DLH
19	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Yang Telah Mealakukan Pendaftaran	1.325.917.948	1.307.453.200	100,00	98,61	DUKCAPIL
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil	120.174.700	119.373.450	100,00	99,33	DUKCAPIL
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Informasi Data Kependudukan	91.525.800	90.276.600	100,00	98,64	DUKCAPIL
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan	5.250.000	5.250.000	100,00	100,00	DUKCAPIL
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	4.674.655.308	4.381.185.205	99,77	93,72	DUKCAPIL
20	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		-	-			
1	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			DINAS PMD
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Kerja Sama Yang Dilakukan	-	-			DINAS PMD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berstatus Maju	4.949.523.128	4.859.420.506	100,00	98,18	DINAS PMD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK Dan Posyandu Aktif)	1.003.441.789	850.425.100	100,00	84,75	DINAS PMD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	4.198.909.155	3.894.777.841	100,00	92,76	DINAS PMD
21	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Yang Optimal	720.030.300	715.373.226	95,71	99,35	DISHUB
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Pelabuhan Lokal Dan Penyeberangan Yang Dibangun/Dipelihara Dan Dikendalikan/Diawasi	-	-			DISHUB

3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	7.248.665.368	7.070.745.082	97,51	97,55	DISHUB
22	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1.776.726.050	1.776.679.050	100,00	100,00	DISKOMINFO
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Layanan Public Secara Online	698.177.200	665.529.300	100,00	95,32	DISKOMINFO
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.455.231.663	3.229.245.117	97,24	93,46	DISKOMINFO
23	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah Dalam Memenuhi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)	32.672.000	32.590.500	100,00	99,75	DISKOMINFO
24	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Tata Kelola Keamanan Sistem Informasi Pada Perangkat Daerah	36.227.000	34.269.800	100,00	94,60	DISKOMINFO
25	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		-	-			
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	73.294.300	58.079.300	56,25	79,24	DISKOP & UKM
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Kabupaten/ Kota	4.988.400	-	0,00	0,00	DISKOP & UKM
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi Yang Wilayah Keanggotannya Dalam Kabupaten/Kota	15.158.600	44.893.600	100,00	296,16	DISKOP & UKM
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Kabupaten Kota	320.009.160	287.345.960	66,67	89,79	DISKOP & UKM
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	175.576.000	114.479.000	100,00	65,20	DISKOP & UKM
6	Program Pengembangan Umkm	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	697.462.222	692.822.222	100,00	99,33	DISKOP & UKM
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.637.879.715	4.467.025.136	100,00	122,79	DISKOP & UKM
26	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	11.935.665.474	8.802.584.992	100,00	73,75	DISPUSAKA
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	4.607.594.156	4.315.776.096	95,28	93,67	DISPUSAKA
27	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
1	Program Pengelolaan Arsip	Arsip Yang Dikelola	53.858.000	53.511.000	100,00	99,36	DISPUSAKA

2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Yang Berhasil Diselamatkan Dan Dilindungi	-	-				DISPUSAKA
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	1.244.156.192	1.240.272.082	64,29	99,69		DISKANLUT
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	100.344.100	100.121.250	100,00	99,78		DISKANLUT
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Angka Konsumsi Ikan	430.123.490	430.103.493	100,00	100,00		DISKANLUT
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemebuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.896.183.372	3.577.753.064	86,86	91,83		DISKANLUT
29	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif Sebagai Kader Anti Kenakalan Remaja	273.089.300	209.992.799	100,00	76,90		DISPORAPAR
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Penambahan Dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	1.662.009.350	1.306.822.412	83,33	78,63		DISPORAPAR
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	-	-	-	-		DISPORAPAR
30	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata Yang Tertata	373.050.000	254.171.400	25,00	68,13		DISPORAPAR
2	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Dan Pemasaran Objek Wisata (Lokasi)	988.759.000	988.190.387	100,00	99,94		DISPORAPAR
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki HAKI	-	-				DISPORAPAR
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Yang Terampil	799.228.600	778.364.925	100,00	97,39		DISPORAPAR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	4.296.491.162	1.461.371.243	92,11	34,01		DISPORAPAR
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Jumlah Sarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Dan Produksi Pertanian Persentase Peningkatan Jumlah Sarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Dan Produksi Pertanian	3.303.654.088	2.756.239.927	100,00	83,43		DINAS TPHP
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Jumlah Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Efisiensi Biaya Produksi Dan Produktivitas	1.970.424.000	1.837.760.304	100,00	93,27		DINAS TPHP
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Jumlah Bencana Yang Di Kendalikan	78.900.000	78.900.000	100,00	100,00		DINAS TPHP
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1.025.773.000	827.213.092	100,00	80,64		DINAS TPHP
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	14.625.751.334	13.919.989.199	86,21	95,17		DINAS TPHP
32	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							

1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Unggulan Pertanian Terhadap PDRB	1.349.414.300	1.857.641.908	101,09	137,66	DINAS PKH
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Unggulan Pertanian Terhadap PDRB	274.367.600	274.355.600	100,00	100,00	DINAS PKH
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan	436.833.397	434.880.188	100,00	99,55	DINAS PKH
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Jumlah Bencana Pertanian Yang Di Kendalikan	-	-			DINAS PKH
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	-	-			DINAS PKH
6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	268.620.400	394.282.100	304,76	146,78	DINAS PKH
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	5.641.444.196	5.299.911.128	95,87	93,95	DINAS PKH
33 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Tertib Niaga	-	-			DISPERINDAG
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Tertatanya Tempat Berusaha Bagi PKL Dan Asongan	2.227.158.904	2.059.099.776	100,00	92,45	DISPERINDAG
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pelaku Usaha Yang Tertib Niaga	892.979.655	883.522.700	100,00	98,94	DISPERINDAG
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	-	-			DISPERINDAG
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kegiatan Pameran Dagang Dan Misi Dagang	448.096.310	445.992.130	86,67	99,53	DISPERINDAG
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar Dan Kecil	-	-			DISPERINDAG
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	5.150.663.695	4.902.652.121	95,56	95,18	DISPERINDAG
34 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Yang Di Bina	1.803.424.572	1.797.682.677	100,00	99,68	DISPERINDAG
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM Yang Di Bina	1.024.344.500	1.016.725.975	100,00	99,26	DISPERINDAG
35 Sekretariat Daerah							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	63.957.114.457	62.068.326.678	98,12	97,05	SETDA
36 Sekretariat DPRD							
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	12.250.426.075	11.089.313.207	83,33	90,52	SETWAN
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	27.501.820.780	26.734.891.972	99,58	97,21	SETWAN
37 Perencanaan							
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Arah Kebijakan RPJMD Dalam RKPD.	1.106.330.500	1.168.000.750	100,00	105,57	BAPPEDALITBA NGDA
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1.247.995.000	1.257.047.250	100,00	100,73	BAPPEDALITBA NGDA

3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerahbidang Pemerintahan, SDM, Ekonomi Dan Infrastruktur	8.075.303.352	7.959.694.529	95,45	98,57	BAPPEDALITBANGA
38	Penelitian Dan Pengembangan						
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Inovasi Daerah	1.239.311.400	1.217.194.230	66,67	98,22	BAPPEDALITBANGDA
39	Keuangan						
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	341.504.531.684	106.503.199.200	92,86	31,19	BPKAD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	726.926.600	684.534.844	100,00	94,17	BPKAD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	183.390.328.258	167.937.409.212	99,31	91,57	BPKAD
40	Keuangan						
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	2.387.690.235	2.364.009.961	98,76	99,01	BAPENDA
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	10.846.320.564	10.327.187.478	94,74	95,21	BAPENDA
41	Kepegawaian						
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	2.181.176.146	2.015.864.428	93,32	92,42	BKPSDM
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Adminisitrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	5.197.211.447	4.975.406.133	100,00	95,73	BKPSDM
42	Pendidikan Dan Pelatihan						
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Telah Memiliki Pengetahuan Dan Ketrampilan Seseu	616.158.700	562.231.399	99,51	91,25	BKPSDM
43	Inspektorat Daerah						
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal Dan Eksternal Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah	2.690.275.300	1.884.517.015	100,00	70,05	INSPEKTORAT DAERAH
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas Pengawasan Internal	973.230.711	787.581.667	100,00	80,92	INSPEKTORAT DAERAH
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	11.875.063.411	11.564.364.465	100,00	97,38	INSPEKTORAT DAERAH
44	Kesatuan Bangsa Dan Politik						
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kecamatan Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	581.093.100	581.061.100	100,00	99,99	BADAN KESBANGPOL
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	14.900.797.300	14.901.343.100	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, Ormas Dan OKP	139.306.600	87.120.100	75,00	62,54	BADAN KESBANGPOL
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penguatan Rasa Nasionalisme	150.604.400	150.604.400	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL

5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	6.032.197.000	6.012.948.500	100,00	99,68	BADAN KESBANGPOL
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	3.192.361.978	2.982.252.059	66,67	93,42	BADAN KESBANGPOL
1	Kecamatan Sausu						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	14.855.000	14.855.000	100,00	100,00	SAUSU
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	11.898.000	11.898.000	100,00	100,00	SAUSU
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	8.235.000	8.235.000	100,00	100,00	SAUSU
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	2.225.514.466	2.191.067.480	100,00	98,45	SAUSU
2	Kecamatan Torue						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	8.311.500	8.267.000	100,00	99,46	TORUE
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	6.026.800	5.961.000	100,00	98,91	TORUE
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	6.971.100	6.848.000	100,00	98,23	TORUE
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1.995.421.047	1.987.564.454	91,88	99,61	TORUE
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	8.311.500	8.267.000	100,00	99,46	TORUE
3	Kecamatan Parigi Selatan						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			PARIGI SELATAN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	35.880.700	14.275.000	0,00	39,78	PARIGI SELATAN
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	12.378.400	5.660.000	0,00	45,72	PARIGI SELATAN
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-			PARIGI SELATAN
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.664.255.495	1.397.230.047	43,57	83,96	PARIGI SELATAN
4	Kecamatan Parigi						

1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	48.574.400	48.574.400	100,00	100,00	PARIGI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	1.200.624.900	28.416.900	16,67	2,37	PARIGI
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			PARIGI
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			PARIGI
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)	6.380.155.986	5.291.121.647	15,22	82,93	PARIGI
5	Kecamatan Ampibabo						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	6.137.600	6.137.600	100,00	100,00	AMPIBABO
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	10.357.000	10.357.000	100,00	100,00	AMPIBABO
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	8.505.600	8.505.600	100,00	100,00	AMPIBABO
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		24.615.600	24.615.600	100,00	100,00	AMPIBABO
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.888.251.575	1.694.850.105	100,00	89,76	AMPIBABO
6	Kecamatan Kasimbar						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	21.505.000	21.505.000	100,00	100,00	KASIMBAR
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	15.969.900	15.069.900	100,00	94,36	KASIMBAR
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	16.840.000	12.160.000	80,00	72,21	KASIMBAR
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-			KASIMBAR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	2.158.434.335	1.926.803.492	98,86	89,27	KASIMBAR
7	Kecamatan Tinombo Selatan						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	148.669.692	104.037.436	0,00	69,98	TINOMBO SELATAN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	-	-			TINOMBO SELATAN
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	2.590.700	-	0,00	0,00	TINOMBO SELATAN
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.429.000	678.400	0,00	7,19	TINOMBO SELATAN

5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	2.127.226.397	1.491.959.124	15,00	70,14	TINOMBO SELATAN
8	Kecamatan Tinombo		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	6.466.300	6.090.000	100,00	94,18	TINOMBO
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	14.345.600	1.190.000	100,00	8,30	TINOMBO
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	22.870.000	11.170.000	85,71	48,84	TINOMBO
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		7.352.000	2.610.000	100,00	35,50	TINOMBO
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.775.705.442	1.507.560.992	123,64	84,90	TINOMBO
9	Kecamatan Palasa		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			PALASA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	-	-			PALASA
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	9.660.000	9.660.000	100,00	100,00	PALASA
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		29.741.500	29.741.500	100,00	100,00	PALASA
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	-	-			PALASA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	1.603.479.591	1.372.649.653	91,67	85,60	PALASA
10	Kecamatan Mepanga						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	20.391.800	20.148.910	100,00	98,81	MEPANGA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	13.162.800	13.022.000	100,00	98,93	MEPANGA
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	12.600.000	12.589.500	100,00	99,92	MEPANGA
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		4.600.000	4.460.000	100,00	96,96	MEPANGA
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.806.456.992	1.558.776.925	93,75	86,29	MEPANGA
11	Kecamatan Bolano Lambunu		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			BOLANO LAMBUNU

2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	48.639.000	48.639.000	100,00	100,00	BOLANO LAMBUNU
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	53.327.700	53.327.700	100,00	100,00	BOLANO LAMBUNU
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.757.200	9.757.200	100,00	100,00	BOLANO LAMBUNU
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	2.041.666.617	1.848.190.434	98,96	90,52	BOLANO LAMBUNU
12	Kecamatan Moutong		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	67.347.200	66.988.200	100,00	99,47	MOUTONG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	22.612.200	22.589.450	100,00	99,90	MOUTONG
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			MOUTONG
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		21.718.000	21.717.900	100,00	100,00	MOUTONG
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	2.063.963.830	1.172.701.635	95,83	56,82	MOUTONG
13	Kecamatan Toribulu		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	22.665.800	22.665.800	0,00	100,00	TORIBULU
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	-	-			TORIBULU
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	21.041.100	21.041.100	100,00	100,00	TORIBULU
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		29.912.200	29.912.200	100,00	100,00	TORIBULU
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.479.675.808	1.234.834.704	10,48	83,45	TORIBULU
14	Kecamatan Taopa		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	32.579.000	32.551.850	100,00	99,92	TAOPA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	5.645.000	5.585.000	100,00	98,94	TAOPA
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	33.279.000	12.370.000	50,00	37,17	TAOPA
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		21.980.000	21.979.600	100,00	100,00	TAOPA

5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.642.933.552	1.542.278.952	100,00	93,87	TAOPA
15	Kecamatan Tomini		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		9.014.000	2.271.900	0,00	25,20	TOMINI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Publik Di Kecamatan	48.876.700	20.458.300	50,00	41,86	TOMINI
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	5.100.000	5.098.500	100,00	99,97	TOMINI
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		8.709.900	-	0,00	0,00	TOMINI
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.455.093.430	923.512.601	30,21	63,47	TOMINI
16	Kecamatan Parigi Barat		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	21.020.000	21.017.250	100,00	99,99	PARIGI BARAT
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	18.909.400	4.998.413	50,00	26,43	PARIGI BARAT
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			PARIGI BARAT
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-			PARIGI BARAT
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.587.309.793	1.532.039.571	85,71	96,52	PARIGI BARAT
17	Kecamatan Balinggi		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	25.713.800	25.475.800	100,00	99,07	BALINGGI
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PKK Aktif	16.366.400	16.366.400	100,00	100,00	BALINGGI
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	14.568.300	14.446.300	100,00	99,16	BALINGGI
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.897.963.574	1.833.665.916	89,50	96,61	BALINGGI
18	Kecamatan Siniu		-	-			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			SINIU
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	15.072.400	15.072.400	100,00	100,00	SINIU
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			SINIU

4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	SINIU
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.627.752.119	1.429.613.985	97,84	87,83	SINIU
19	Kecamatan Parigi Utara						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	8.573.100	8.573.100	100,00	100,00	PARIGI UTARA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	11.297.200	9.617.200	100,00	85,13	PARIGI UTARA
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			PARIGI UTARA
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3.106.500	3.106.500	100,00	100,00	PARIGI UTARA
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.720.177.290	1.644.388.448	100,00	95,59	PARIGI UTARA
20	Kecamatan Parigi Tengah						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	2.813.300	2.813.300	100,00	100,00	PARIGI TENGAH
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	11.180.400	11.180.400	100,00	100,00	PARIGI TENGAH
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			PARIGI TENGAH
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		7.774.900	8.128.400	100,00	104,55	PARIGI TENGAH
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	2.338.389.461	1.693.268.592	94,44	72,41	PARIGI TENGAH
21	Kecamatan Ongka Malino						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		6.488.000	6.477.500	100,00	99,84	ONGKA MALINO
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		41.065.800	40.666.550	100,00	99,03	ONGKA MALINO
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		55.119.284	55.024.625	100,00	99,83	ONGKA MALINO
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.271.237.078	1.131.787.470	100,00	89,03	ONGKA MALINO
22	Kecamatan Bolano						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	-	-			BOLANO
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	56.193.100	53.417.400	100,00	95,06	BOLANO

3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	27.121.200	25.918.950	95,00	95,57	BOLANO
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		35.050.000	35.000.000	100,00	99,86	BOLANO
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.597.522.337	1.421.631.127	84,52	88,99	BOLANO
23	Kecamatan Sidoan						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	13.622.800	624.800	0,00	4,59	SIDOAN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase PKK Aktif	22.885.300	472.300	8,33	2,06	SIDOAN
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	34.900.000	5.400.000	33,33	15,47	SIDOAN
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		4.676.800	826.800	0,00	17,68	SIDOAN
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Administrasi Dan BMD Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1.314.738.669	832.959.265	43,75	63,36	SIDOAN



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	57.913.204.000,00	60.314.621.023,39	104,15	27.340.977.730,90
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	5.328.755.083,00	4.810.059.732,00	90,27	17.569.724.767,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.179.371.796,00	8.179.371.796,00	100,00	7.175.716.029,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	108.447.630.075,00	117.494.609.676,84	108,34	93.598.339.386,70
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 s/d 6)		179.868.960.954,00	190.798.662.228,23	106,08	145.684.757.913,60
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.473.390.311.000,00	1.405.870.563.037,00	95,42	1.581.652.462.933,00
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	124.197.627.783,90	85.105.402.515,26	68,52	76.042.302.066,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer (10 s/d 11)		1.597.587.938.783,90	1.490.975.965.552,26	93,33	1.657.694.764.999,00
13						
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
15	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	2.694.873.250,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	44.209.536.531,00	37.721.473.344,00	85,32	19.752.916.346,00
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (15 s/d 16)		44.809.536.531,00	38.321.473.344,00	85,52	22.447.789.596,00
18						
19	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+12+17)		1.822.266.436.268,90	1.720.096.101.124,49	94,39	1.825.827.312.508,60
20						
21	BELANJA DAERAH	5.1.2				
22	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
23	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	819.264.528.100,41	770.555.649.314,00	94,05	668.708.469.509,00
24	Belanja Barang dan jasa	5.1.2.1.2	488.065.733.264,54	461.146.885.430,66	94,48	476.241.054.690,64
25	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	20.000.000,00	6.511.281,94	32,56	91.004.047,01
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	65.245.684.637,99	64.614.321.232,00	99,03	140.127.232.313,00
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.428.853.600,00	2.416.360.475,00	99,49	2.425.683.600,00
28	Jumlah Belanja Operasi (23 s/d 27)		1.375.024.799.602,94	1.298.739.727.733,60	94,45	1.287.593.444.159,65
29						
30	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
31	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	157.800.000,00	157.800.000,00	100,00	630.535.000,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	42.735.025.950,00	38.959.368.166,00	91,16	44.184.981.772,00
33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	54.787.800.017,00	45.833.877.376,00	83,66	47.308.704.062,56
34	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	27.652.314.837,00	20.106.762.760,77	72,71	76.878.754.824,00
35	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	7.855.148.700,00	11.113.139.832,00	141,48	7.080.658.750,00
36	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	5.430.865.434,00	2.497.258.211,00	45,98	1.247.680.576,00
37	Jumlah Belanja Modal (31 s/d 36)		138.618.954.938,00	118.668.206.345,77	85,61	177.331.314.984,56
38						
39	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
40	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	7.450.000.000,00	5.693.575.463,25	76,42	7.494.076.981,00
41	Jumlah Belanja Tidak Terduga (40)		7.450.000.000,00	5.693.575.463,25	76,42	7.494.076.981,00
42						
43	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
44	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.502.077.344,00	6.411.116.732,00	98,60	2.860.764.889,00
45	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	322.341.932.300,00	276.538.111.326,00	85,79	331.121.089.269,00
46	Jumlah Belanja Transfer (44 s/d 45)		328.844.009.644,00	282.949.228.058,00	86,04	333.981.854.158,00
47						
48	JUMLAH BELANJA DAERAH (28+37+41+46)		1.849.937.764.184,94	1.706.050.737.600,62	92,22	1.806.400.690.283,21
49	SURPLUS/ DEFISIT (19 - 48)		(27.671.327.916,04)	14.045.363.523,87	(50,76)	19.426.622.225,39
50						
51	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
52	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
53	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	28.921.327.916,04	28.921.327.916,04	100,00	13.961.372.357,65
54	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (53)		28.921.327.916,04	28.921.327.916,04	100,00	13.961.372.357,65



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
55	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
56	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
57	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	250.000.000,00	227.562.334,00	91,02	466.666.667,00
58	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (56 s/d 57)		1.250.000.000,00	1.227.562.334,00	98,20	4.466.666.667,00
59						
60	PEMBIAYAAN NETTO (54-58)		27.671.327.916,04	27.693.765.582,04	100,08	9.494.705.690,65
61						
62	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (49 + 60)	5.1.4	0,00	41.739.129.105,91	0,00	28.921.327.916,04

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI PARIGI MOUTONG

ERWIN BURASE